



DIKTAT

Mata Kuliah

KAWASAN AUSTRALIA DAN PASIFIK SELATAN

Pengajar

Ahmad Khoirul Umam, PhD

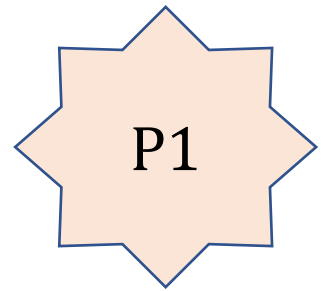
Semester Genap 2021/2022

**Prodi Hubungan Internasional,
Fakultas Falsafah & Peradaban
Universitas Paramadina, Jakarta**

Daftar Isi

	Halaman
Kelas ke-1: Pengantar Kawasan Australia dan Pasifik.....	3
Kelas ke-2: Sejarah, ekonomi, politik dan sosial budaya Australia.....	10
Kelas ke-3: Sistem politik dan kebijakan luar negeri Australia.....	14
Kelas ke-4: Keamanan di kawasan Australia dan Pasifik.....	21
Kelas ke-5: Hubungan Australia dengan Great Powers: Amerika Serikat.....	30
Kelas ke-6: Australia dan Great Powers: Jepang dan RRC.....	42
Kelas ke-7: Australia dan Great Powers: Rusia dan India.....	55
Kelas ke-8: Ujian Tengah Semester	64
Kelas ke-9: Keterlibatan Australia dalam organisasi internasional dan regional	65
Kelas ke-10: Pengantar mengenai negara-negara Pasifik Pembahasan kritis mengenai Fiji dan Kepulauan Solomon.....	70
Kelas ke-11: Pembahasan kritis mengenai Papua Nugini, Selandia Baru, Tonga dan Vanuatu.....	76
Kelas ke-12: Hubungan negara-negara Pasifik dan <i>Great Powers</i> Negara-negara Pasifik dan regionalisme: <i>Pacific Island Forum</i> and <i>Southwest Pacific Forum</i>	104
Kelas ke-13: Masalah di negara-negara Pasifik: Pemerintahan dan Politik.....	111
Kelas ke-14: Masalah di negara-negara Pasifik: Kejahatan transnasional dan Trafficking.....	115
Kelas ke-15: Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Sejarah & Relasi Kontemporer.....	119
Kelas ke-16: Ujian Akhir Semester	128

PENGANTAR KAWASAN AUSTRALIA DAN PASIFIK



DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta kemampuan analisa bagi mahasiswa mengenai Australia dan Kawasan pasifik dalam dimensi teoritis dan aplikatif. Dalam dimensi teoritis, mata kuliah ini menekankan pada pemahaman terhadap hakikat hubungan internasional, konsep, teori, pola, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya mahasiswa akan diajak mengenal interaksi diantara negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik yang menentukan konfigurasi power sekaligus juga interaksi antara negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai kawasan Pasifik dengan Australia dan kawasan Pasifik Selatan sebagai inti materi
2. Agar mahasiswa memperoleh dan dapat mengembangkan kemampuan analitis aplikatif terhadap berbagai isu, kejadian dan fenomena terutama isu keamanan non tradisional.

SILABUS PEMBELAJARAN

KELAS KE-	MATERI	DOSEN	METODE
1	Pengantar Kawasan Australia dan Pasifik	AKU	Online (zoom meeting)
2	Pengantar umum sejarah, ekonomi, politik dan sosial budaya Australia	AKU	Online (zoom meeting)
3	Sistem politik dan kebijakan luar negeri Australia	AKU	Online (zoom meeting)
4	Keamanan di kawasan Australia dan Pasifik	AKU	Online (zoom meeting)
5	Hubungan Australia dengan Great Powers: AS	AKU	Online (zoom meeting)
6	Australia dan Great Powers: Jepang dan RRC	AKU	Online (zoom meeting)
7	Australia dan Great Powers: Rusia dan India	AKU	Online (zoom meeting)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)			
9	Keterlibatan Australia dalam organisasi internasional dan regional	AKU	Online (zoom meeting)
10	Pengantar mengenai negara-negara Pasifik Pembahasan kritis mengenai Fiji dan Kepulauan Solomon	AKU	Online (zoom meeting)
11	Pembahasan kritis mengenai Papua Nugini, Selandia Baru, Tonga dan Vanuatu	AKU	Online (zoom meeting)
12	Hubungan negara-negara Pasifik dan Great Powers Negara-negara Pasifik dan regionalisme: Pacific Island Forum and Southwest Pacific Forum	AKU	Online (zoom meeting)
13	Masalah di negara-negara Pasifik: Kejahatan transnasional dan Trafficking	AKU	Online (zoom meeting)
14	Masalah di negara-negara Pasifik: Pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan	AKU	Online (zoom meeting)
15	Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Sejarah & Relasi Kontemporer	AKU	Online (zoom meeting)
16. Ujian Akhir Semester (UAS) - Keterangan: DR. AHMAD KHOIRUL UMAM (AKU)			

KETENTUAN KEHADIRAN KELAS

Metode Pembelajaran Daring

- a) *Asynchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform eLearning* Paramadina; atau Whatsapp Group
- b) *Synchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform* Zoom

Tugas-tugas:

- a) Sebelum pertemuan kelas: Membaca bahan perkuliahan terkait materi yang akan disampaikan pada saat kelas sebelumnya
- b) Nilai perkuliahan: Tugas terstruktur pada pertemuan kelas yang telah ditetapkan atau satu makalah ilmiah

TATA CARA PENILAIAN

Bobot Penilaian:

1. Rata-rata Nilai yang diberikan Dosen selama perkuliahan adalah:
 - Keaktifan mahasiswa dan hasil tugas-tugas perkuliahan (20%)
 - Nilai Ujian Tengah Semester atau UTS (40%)
 - Nilai Ujian Akhir Semester atau UAS (40%)
 - Nilai akhir merupakan kewenangan Dosen untuk menentukannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Apabila Dosen menilai perlu melakukan penyesuaian pembobotan nilai akhir dengan pertimbangan menjunjung tinggi kepentingan mahasiswa maka Dosen berhak melakukannya.
 - Hal-hal yang disepakati dalam kontrak ini dapat ditinjau kembali antara dosen dan mahasiswa di kemudian hari. Perubahan isi kontrak perkuliahan akan dilaksanakan dengan pemberitahuan.

Kriteria Penilaian:

Nilai Interval

A	≥ 85
-A	80-84
B+	75-79
B	70-74
-B	65-69
C+	60-64
C	≤ 55-59
D	Indisipliner

Kontak

Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

ahmad.khoirul@paramadina.ac.id

Akses materi kuliah dan panduan perkuliahan:

<http://elearning.paramadina.ac.id>

Peraturan selama Penyelenggaraan Praktikum Daring

Asynchronous

- Dosen berhak menentukan absensi sebagai penanda kehadiran berdasarkan pengisian langsung di *MyParmad* ataupun melalui bukti pengumpulan tugas.
- Pada pengisian langsung, Dosen akan melakukan pengisian BAP Perkuliahan *Online* di *MyParmad* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati
- Jadwal perkuliahan pengganti yang telah disepakati Dosen dan Mahasiswa akan disesuaikan ketika Dosen menginformasikan kepada mahasiswa dan Bagian Akademik Universitas
- Pada pengisian kehadiran berdasarkan bukti pengumpulan tugas, Dosen akan melakukan koordinasi dengan Tim Akademik Program Studi untuk pengisian BAP maupun absensi mahasiswa.

Synchronous

- Dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan metode *synchronous*, pengisian BAP perkuliahan *Online* di *MyParmad* baru akan dilakukan Dosen ketika perkuliahan selesai.
- Selama perkuliahan berlangsung, absensi dengan Google Form akan disebarkan dan mahasiswa wajib mengisi dengan melampirkan bukti foto mengikuti perkuliahan *online*.
- Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus melakukan *mute audio* dan Dosen akan meminta untuk mengaktifkan audio apabila diperlukan.
- Selama perkuliahan berlangsung, sewaktu-waktu Dosen dapat meminta untuk mengaktifkan fitur video dan mahasiswa harus siap.

TUGAS PERKULIAHAN 1

Capaian Belajar :

Setelah menyelesaikan kelas pertama ini mahasiswa dapat memahami konteks mata kuliah Australia & Kawasan Pasifik sebagai bagian dari domain Studi Kawasan dalam Kajian Hubungan Internasional.

Cakupan Pemahaman

- Penjelasan SAP
- Penjelasan metode perkuliahan
- Perumusan aturan perkuliahan
- Penjelasan komponen penilaian, tugas, dan lainnya.
- Pengenalan kawasan Australia dan Pasifik.
- Sejarah awal berdirinya Australia
- Konteks Australia dalam Perang Dunia Kedua
- Perubahan orientasi kebijakan politique luar negeri Australia pasca Perang Dunia Kedua

TUGAS PRAKTIKUM

- Mahasiswa secara berkelompok melakukan telaah literatur tentang peran Australia dalam perkembangan geo-ekonomi politik kontemporer
- Setelah menemukan artikel-artikel mengenai hal tersebut, diskusikan dan susun *summary* tentang peran Australia dalam perkembangan geo-ekonomi politik kontemporer sebagai berikut:
 - Kepentingan politik luar negeri Australia
 - Aliansi Ekonomi-Politik Australia
 - Peran Australia dalam Ekonomi-Politik Internasional
- *Summary* disajikan dalam bentuk *power point* dan dikumpulkan kepada Dosen

PENGANTAR UMUM SEJARAH, EKONOMI, POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA AUSTRALIA



P2

CAPAIAN BELAJAR

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan secara umum mengenai sejarah, ekonomi, politik dan sosial budaya Australia

SEJARAH, EKONOMI, POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA AUSTRALIA

Australia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik dari segi lanskap fisik maupun masyarakatnya. Mulai dari warisan asli hingga masyarakat multikultural modern, sejarah, ekonomi, politik, dan dinamika sosial budaya Australia mencerminkan potret yang kompleks dan multifaset. Dalam artikel ini, kami menjelajahi berbagai aspek identitas nasional Australia dan memberikan tinjauan atas literatur yang paling relevan.

Sejarah Australia kaya dan kompleks, dengan perpaduan unik pengaruh asli dan kolonial. Orang Aborigin adalah orang Australia pertama, dan warisan budaya dan spiritual mereka telah ada selama lebih dari 60.000 tahun. Kedatangan para pemukim Inggris pada tahun 1788 menandai awal babak baru dalam sejarah Australia, yang ditandai oleh pengusuran dan marginalisasi orang-orang asli. Warisan kolonial ini terus membentuk masyarakat Australia kontemporer, dan proses rekonsiliasi yang sedang

berlangsung menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam beberapa dekade terakhir.

Australia memiliki ekonomi yang sangat berkembang dan terdiversifikasi, dengan fokus yang kuat pada sumber daya alam, manufaktur, dan jasa. Negara ini adalah salah satu eksportir utama mineral, terutama batubara dan bijih besi, dan merupakan produsen utama produk pertanian seperti daging sapi, gandum, dan susu. Sektor jasa, termasuk keuangan, pendidikan, dan pariwisata, juga merupakan kontributor yang signifikan terhadap ekonomi. Meskipun memiliki populasi yang relatif kecil, Australia secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan standar hidup yang tinggi dan sistem kesejahteraan sosial yang kuat.

Australia adalah demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan federal. Sistem politik didominasi oleh dua partai besar, Partai Buruh Australia dan Partai Liberal Australia, dengan partai-partai kecil dan independen juga diwakili di parlemen. Isu-isu kunci dalam politik Australia termasuk imigrasi, perubahan iklim, dan hak-hak pribumi. Negara ini memiliki tradisi sosial demokrasi yang kuat, dengan sistem perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial yang komprehensif.

Australia adalah masyarakat yang beragam budaya, dengan populasi yang mencerminkan berbagai latar belakang etnis, linguistik, dan agama. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa resmi, masih ada banyak bahasa asli yang digunakan, serta komunitas signifikan dari imigran yang tidak berbahasa Inggris. Australia memiliki tradisi egalitarian yang kuat, dengan fokus pada keadilan dan keadilan sosial. Negara ini juga memiliki warisan budaya yang kaya, dengan adanya seni dan kegiatan budaya yang mencerminkan perpaduan dari budaya asli, kolonial, dan imigran. Seni,

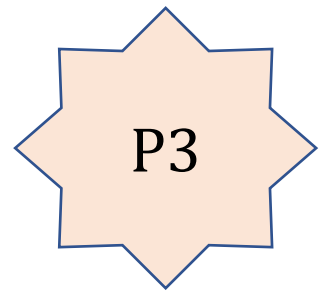
musik, dan sastra Australia terkenal di seluruh dunia, dan banyak seniman Australia telah meraih pengakuan internasional.

Australia adalah negara yang kaya dan kompleks dalam berbagai aspek, termasuk sejarah, ekonomi, politik, dan dinamika sosial budayanya. Sejarahnya mencerminkan perpaduan unik dari pengaruh asli dan kolonial, sementara ekonominya kuat dan terdiversifikasi. Sistem politik Australia adalah demokrasi parlementer yang didominasi oleh dua partai besar, dan masyarakatnya yang beragam budaya mencerminkan warisan budaya yang kaya dan beragam. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi dalam proses rekonsiliasi dan pengakuan hak-hak pribumi, Australia terus memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakatnya yang multikultural. Selanjutnya, baca lebih detail melalui sejumlah referensi berikut ini:

1. Australia Bureau of Statistics. (2021). Australian economy at a glance. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-economy-glance/latest-release>.
2. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia's democracy. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.dfat.gov.au/geo/australia/Pages/australias-democracy>.
3. Australian Government National Museum of Australia. (2021). Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.nma.gov.au/explore/features/indigenous-australians>.
4. Kildea, P. (2018). Australia: A cultural history. Oxford University Press.
5. Markus, A. (2019). The Australian settlement: The colonial origins of Australian socialism. Monash University Publishing.
6. National Indigenous Australians Agency. (2021). Reconciliation. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.niaa.gov.au/indigenous-affairs/reconciliation>.
7. Royal Australian Historical Society. (2021). Australian history. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.rahs.org.au/australian-history/>.

8. Tourism Australia. (2021). Australian culture. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://www.australia.com/en/facts/culture.html>.
9. Attwood, B., & Markus, A. (Eds.). (2019). *The Struggle for Aboriginal Rights: A Documentary History*. Allen & Unwin.
10. Australian Bureau of Statistics. (2021). *Australia's Economy at a Glance*.
11. Australian Government. (2021). *About Australia: Our Country, Our Culture, Our People*.
12. Kildea, P. (2020). *Australian Political Institutions*. Oxford University Press.
13. Markus, A., & Pham, B. (Eds.). (2019). *Australia's Immigration Revolution*. ANU Press.
14. Moran, A. (2020). *The Politics of Australian Society: Political Issues for the New Century*. Pearson Australia.
15. Rickard, J., & McConvell, P. (Eds.). (2020). *The Cambridge Handbook of the Languages of Australia*. Cambridge University Press.
16. Smith, M. (2021). *Australian Cultural Policy: The Art of the Possible*. Routledge.

SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA



CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa bisa memahami Sistem politik Australia dan konstelasi domestiknya
- Mahasiswa bisa memahami intermestik faktor dalam kebijakan luar negeri Australia

SISTEM POLITIK AUSTRALIA DAN KONSTELASI DOMESTIKNYA

Australia adalah salah satu negara yang memiliki sistem politik demokratis dengan parlemen federal yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Sistem politik di Australia sangat berbeda dengan sistem politik di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, kebijakan luar negeri Australia juga dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dalam konstelasi politik domestik maupun internasional. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang sistem politik Australia dan konstelasi politik domestik yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia.

Sistem Politik Australia

Sistem politik di Australia berbeda dengan sistem politik di Amerika Serikat dan Inggris. Australia memiliki sistem politik demokratis dengan parlemen federal yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Senat terdiri dari anggota yang dipilih oleh masing-masing negara bagian dan wilayah.

Pemilihan umum di Australia diadakan setiap tiga tahun sekali untuk memilih anggota parlemen federal. Pemilihan umum di Australia menggunakan sistem preferensi, di mana pemilih memberikan suara mereka kepada calon berdasarkan preferensi mereka, mulai dari yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai. Sistem preferensi memungkinkan pemilih untuk memilih calon yang mereka sukai tanpa harus khawatir bahwa suara mereka akan terbuang percuma.

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik Australia. Ada dua partai politik utama di Australia, yaitu Partai Buruh Australia dan Partai Liberal Nasional. Selain itu, ada juga partai politik minor yang memiliki pengaruh dalam politik Australia, seperti Partai Hijau Australia dan Partai Kekuatan Australia.

Konstelasi Politik Domestik Australia

Konstelasi politik domestik di Australia terdiri dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Sistem politik

Sistem politik demokratis di Australia memungkinkan partai politik untuk memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Partai politik yang memenangkan pemilihan umum memiliki hak untuk membentuk pemerintahan dan menentukan kebijakan politik luar negeri.

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia. Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan terdiversifikasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Australia menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri.

Hubungan dengan Negara Tetangga

Australia memiliki hubungan yang kompleks dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Hubungan ini mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia terutama dalam hal keamanan dan pertahanan.

Faktor Sosial-Budaya

Faktor sosial-budaya juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia. Australia memiliki masyarakat yang multikultural dan pluralistik yang mencerminkan banyak budaya dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Australia cenderung menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Kebijakan Politik Luar Negeri Australia

Kebijakan politik luar negeri Australia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Beberapa kebijakan politik luar negeri Australia antara lain:

Kebijakan Keamanan

Australia adalah anggota aktif dari aliansi keamanan regional seperti ANZUS (Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat) dan ASEAN Regional Forum. Australia juga memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap imigrasi dan pengungsi, dan secara aktif terlibat dalam pertahanan diri dan penanggulangan terorisme.

Kebijakan Lingkungan

Australia memiliki kebijakan lingkungan yang proaktif dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Australia juga aktif dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan di wilayah Pasifik dan memainkan peran penting dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim.

Kebijakan Perdagangan

Australia merupakan negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan menjadi anggota aktif dalam banyak organisasi perdagangan internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Kebijakan Pembangunan Internasional

Australia memiliki kebijakan pembangunan internasional yang progresif dan terlibat dalam banyak program bantuan internasional, terutama di wilayah Pasifik. Australia juga menjadi anggota aktif dalam PBB dan badan-badan PBB lainnya, dan secara aktif mendukung program-program pembangunan internasional.

Sistem politik Australia yang demokratis dengan parlemen federal yang terdiri dari dua kamar memungkinkan partai politik untuk memiliki

pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Konstelasi politik domestik di Australia juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia, terutama dalam hal keamanan, ekonomi, hubungan dengan negara tetangga, dan faktor sosial-budaya. Beberapa kebijakan politik luar negeri Australia antara lain kebijakan keamanan, kebijakan lingkungan, kebijakan perdagangan, dan kebijakan pembangunan internasional. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri Australia harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Australia terpenuhi dan bahwa Australia dapat memainkan peran yang positif dalam politik internasional. Untuk lebih detailnya, silakan membaca sejumlah rekomendasi referensi sebagai berikut:

Referensi:

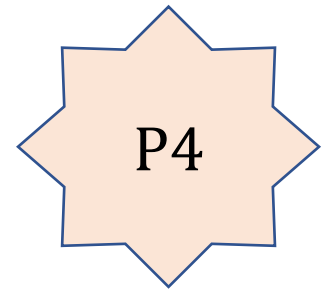
1. Chubb, P. (2016). *The Australian Political System*. Melbourne: Cambridge University Press.
2. Hill, C. (2018). *Australian Foreign Policy in the Age of Terrorism*.
3. Marsh, I., & Uhr, J. (2019). *The Australian Political System in Action*. Melbourne: Cambridge University Press.
4. Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2021). *Australia's Foreign Policy White Paper*. Retrieved from <https://www.fpwhitepaper.gov.au/>
5. Onslow, S. (2019). *Australian Foreign Policy: Controversies and Debates*. Melbourne: Oxford University Press.
6. Smith, G. (2020). *Australian Politics in the 21st Century*. Melbourne: Cambridge University Press.
7. The Lowy Institute. (2021). *Australia's Diplomatic Deficit: Reimagining Australia's International Role*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/australias-diplomatic-deficit-reimagining-australias-international-role>
8. United Nations. (2021). *About the UN*. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us>
9. World Trade Organization. (2021). *About the WTO*. Retrieved from https://www.wto.org/about/who_we_are_en.htm

10. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Aid and Development. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program>
11. Australian Government Department of Home Affairs. (2021). Immigration and Citizenship. Retrieved from <https://www.homeaffairs.gov.au/>
12. Australian Government Department of Defence. (2021). Defence Policy. Retrieved from <https://www.defence.gov.au/strategic-policy/defence-policy/>
13. Australian Government Department of the Environment and Energy. (2021). Climate Change. Retrieved from <https://www.environment.gov.au/climate-change>
14. Australian Bureau of Statistics. (2021). International Trade. Retrieved from <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade>
15. Australian Institute of International Affairs. (2021). About Us. Retrieved from <https://www.internationalaffairs.org.au/about-us/>
16. Department of the Prime Minister and Cabinet. (2021). Australian Government International Framework. Retrieved from <https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/australian-government-international-framework.pdf>
17. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). International Organisations. Retrieved from <https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/Pages/international-organisations.aspx>
18. O'Connor, B., & Davison, R. (2021). Australian Foreign Policy: Revisiting Core Assumptions. Melbourne: Oxford University Press.
19. Trood, R. (2018). Making Australian Foreign Policy. Sydney: UNSW Press.
20. Wiseman, G. (2019). The Big Picture: Towards an Australian Foreign Policy. Sydney: Australian Scholarly Publishing.
21. Yeates, D. (2018). Australian Politics and Policy: The Longest Consensus. Sydney: UNSW Press.
22. Zhang, X. (2020). Australia's Foreign Policy Towards China: The Role of Domestic Factors. Australian Journal of Political Science, 55(2), 182-197.
23. Holmes, R. (2019). Australian Foreign Policy in the Age of Trump. The Strategist. Retrieved from <https://www.aspistrategist.org.au/australian-foreign-policy-in-the-age-of-trump/>

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

1. Masing-masing mahasiswa melakukan review atas materi artikel yang telah di-*share*
2. Kumpulkan laporan dalam bentuk docs dan presentasi singkat dalam bentuk ppt ke ahmad.khoirul@paramadina.ac.id
3. Dalam pertemuan kelas selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil *review* artikel secara singkat dengan waktu per kelompok adalah 10 menit (presentasi dan Q&A).
4. Setiap kelompok dapat memperkaya paper atau bahan presentasinya dengan sumber-sumber lain yang relevan.

KEAMANAN DI KAWASAN AUSTRALIA DAN PASIFIK



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami sejarah politik internasional di Pasifik sejak berakhirnya Perang Dingin sampai masa Unipolar

KEAMANAN AUSTRALIA PASCA PERANG DUNIA

Australia, sebuah negara yang terletak di benua Oseania, memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tantangan keamanan. Sebagai negara yang baru saja merdeka pada tahun 1901, Australia menghadapi berbagai tantangan keamanan pasca terbentuknya sebagai negara merdeka. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Australia adalah Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914-1918. Perang Dunia I sangat mempengaruhi keamanan Australia karena negara ini adalah bagian dari Kekaisaran Inggris dan harus terlibat dalam perang tersebut. Selama Perang Dunia Pertama, Australia ikut berperang di pihak Sekutu melawan Jerman dan Austria-Hungaria. Pasukan Australia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, termasuk Kampanye Gallipoli di Turki.

Setelah Perang Dunia I berakhir, Australia harus menghadapi tantangan keamanan yang baru, yaitu ketegangan antara kekuatan Eropa. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan negara-negara Eropa terhadap hasil Perang Dunia I dan upaya untuk membangun kembali kekuatan ekonomi dan militer. Australia, sebagai negara yang berada di bawah pengaruh Inggris, merasa terancam oleh ketegangan ini. Tantangan keamanan

semakin bertambah pada tahun 1930-an ketika Jepang semakin agresif dalam ekspansi kekuasaannya di kawasan Asia-Pasifik.

Australia sendiri didirikan pada tahun 1901 setelah enam koloni Inggris di Australia bersatu menjadi satu negara. Sebagai negara baru, Australia harus menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negaranya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Australia pada awal abad ke-20 adalah keamanan. Australia harus membangun pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari negara-negara tetangga.

Pada awal abad ke-20, Australia masih di bawah kekuasaan Inggris dan bergantung pada kekuatan militer Inggris untuk pertahanan. Namun, pada saat yang sama, Inggris mulai menarik pasukannya dari Australia untuk digunakan dalam pertempuran di Eropa. Hal ini meninggalkan Australia dengan kelemahan pertahanan yang signifikan.

Tantangan keamanan yang dihadapi oleh Australia semakin meningkat pada Perang Dunia I. Australia menjadi bagian dari Kekaisaran Inggris dan harus terlibat dalam perang tersebut. Selama Perang Dunia I, Australia mengirim lebih dari 400.000 tentara untuk berperang di Eropa dan Timur Tengah. Meskipun Australia berhasil mencapai kemerdekaannya pada tahun 1901, partisipasinya dalam Perang Dunia I menunjukkan bahwa negara ini masih bergantung pada Inggris untuk pertahanan.

Australia tidak memperoleh kemerdekaan penuh sampai tahun 1901, ketika enam koloni Inggris di benua Australia bersatu menjadi satu negara di bawah Konstitusi Australia. Setelah kemerdekaannya, Australia terus memperjuangkan identitas nasionalnya yang unik dan mencari tempat di dunia internasional. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan ini, Australia sering kali menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dan beragam.

Salah satu tantangan keamanan terbesar yang dihadapi Australia pada awal kemerdekaannya adalah ancaman dari kekuatan kolonial yang bersaing. Pada abad ke-19, kekuatan besar seperti Inggris, Perancis, dan Belanda bersaing untuk memperoleh pengaruh di wilayah Pasifik. Australia, sebagai negara yang baru saja merdeka, sering kali menjadi arena persaingan antara kekuatan-kekuatan ini.

Ketika Perang Dunia I meletus, Australia memutuskan untuk membantu Inggris melawan Jerman. Kontribusi Australia dalam perang ini, seperti yang terjadi pada Perang Dunia II, sangat signifikan. Dalam Perang Dunia I, sekitar 420.000 warga Australia bertugas di militer dan hampir 62.000 orang tewas atau terluka. Peran Australia dalam perang ini membantu memperkuat ikatan dengan Inggris dan membantu membentuk identitas nasional Australia.

Selanjutnya, peran Australia dalam Perang Dunia II lebih menentukan arah kebijakan keamanan negara ini pasca-perang. Jepang menduduki wilayah utara Australia pada 1942-1945, yang membuat pemerintah Australia khawatir akan invasi Jepang ke Australia. Sebagai respons atas ancaman ini, Australia meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan bergabung dengan Sekutu untuk menghadapi Jepang.

Selama Perang Dunia Kedua, Australia kembali berperang di pihak Sekutu melawan Jepang. Pada awal perang, Jepang melakukan serangan mendadak di pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang mengakibatkan Amerika Serikat ikut berperang di pihak Sekutu. Jepang kemudian menyerbu Australia dan mencapai titik terjauh mereka di Darwin sebelum akhirnya dikalahkan oleh pasukan Sekutu.

Australia memainkan peran penting dalam perang melawan Jepang di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, Australia menjadi sekutu dekat Amerika Serikat dan Inggris dalam upaya untuk

mengatasi ancaman komunisme di Asia Tenggara. Australia juga menjadi anggota pendiri ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) pada tahun 1951, sebuah aliansi keamanan yang membawa Australia lebih dekat dengan Amerika Serikat. Australia bergabung dengan negara-negara lain untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menandatangani Piagam PBB. Australia juga menjadi anggota NATO dan terlibat dalam Perang Korea pada tahun 1950-1953.

Setelah Perang Dunia Kedua, Australia menghadapi tantangan keamanan baru dari ancaman komunisme. Australia menghadapi ancaman dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok dan Korea Utara yang pada waktu itu mengancam kestabilan di kawasan Pasifik. Selama Perang Dingin, Australia bersekutu dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya melawan Uni Soviet dan Blok Timur. Australia juga berpartisipasi dalam perang Korea dan Vietnam sebagai bagian dari keterlibatannya dalam ANZUS, aliansi keamanan yang dibentuk bersama dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Australia kemudian menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik untuk meningkatkan keamanan regional. Namun, perubahan politik pasca Perang Dingin membawa implikasi baru bagi keamanan regional, di mana pengaruh *Great Powers* semakin meningkat dan berdampak pada dinamika keamanan kawasan. Artikel ini akan membahas sejarah dan tantangan keamanan yang dihadapi oleh Australia pasca Perang Dunia Kedua, berakhirnya Perang Dingin dan implikasinya bagi keamanan regional, serta pengaruh *Great Powers* di kawasan Australia dan Pasifik.

Namun, pada tahun 1956, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menolak membantu Prancis dalam perang melawan Vietnam. Selain itu, ancaman dari Uni Soviet dan Tiongkok pada waktu itu semakin meningkat, dan Australia menjadi khawatir bahwa keamanan nasionalnya terancam.

Pada tahun 1972, Partai Buruh memenangkan pemilihan umum dan memulai periode reformasi dalam politik luar negeri Australia. Australia membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Asia Tenggara dan meningkatkan kerja sama regional melalui ASEAN Regional Forum. Selain itu, Australia juga memperkuat hubungannya dengan Jepang dan Tiongkok.

Namun, perubahan politik global pada akhir 1980-an membawa implikasi baru bagi keamanan Australia. Berakhirnya Perang Dingin mengurangi ancaman komunisme, tetapi menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan pengaruh *Great Powers* di kawasan tersebut.

Australia memiliki hubungan yang kompleks dengan *Great Powers* seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Australia menjadi sekutu penting Amerika Serikat dan merupakan mitra strategis bagi Tiongkok. Namun, kedua negara tersebut memainkan peran yang berbeda dalam kebijakan luar negeri Australia. Amerika Serikat masih menjadi kekuatan yang dominan di kawasan Pasifik, tetapi kebijakan luar negerinya yang tidak konsisten dan proteksionis membuat Australia khawatir tentang keamanan regional.

Tantangan keamanan yang dihadapi Australia terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, Australia memusatkan perhatiannya pada keamanan regional dan mengambil peran yang lebih aktif dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Pada 1999, pasukan Australia terlibat dalam operasi perdamaian di Timor Timur setelah rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Selama Operasi Iraqi Freedom pada tahun 2003, Australia bersekutu dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan rezim Saddam Hussein di Irak.

Teroris menjadi ancaman baru bagi Australia pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, yang mendorong pemerintah Australia untuk memperkuat undang-undang keamanan dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi terorisme. Pada akhir 2010-an dan awal 2020-an, Australia menghadapi tantangan keamanan baru yang berasal dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China. China menjadi mitra dagang terbesar Australia, tetapi hubungan keduanya memburuk setelah terjadi ketegangan Amerika Serikat dan China, serta pandemi Covid-19 yang tersebar pertama kali dari China.

China menjadi kekuatan besar di kawasan Pasifik dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan utama di kawasan, tetapi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kebijakan luar negeri AS mengalami pergeseran yang signifikan dan tidak terduga. Kebijakan "*America First*" yang dicanangkan oleh Presiden Trump memperkuat isolasionisme dan proteksionisme Amerika Serikat, sehingga mengurangi keterlibatan AS di kawasan Pasifik dan meningkatkan ketidakpastian keamanan.

Sementara itu, Tiongkok menjadi kekuatan yang semakin penting di kawasan Pasifik dan mengejar kebijakan ekonomi dan keamanan yang agresif. Tiongkok terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Laut Timor, yang menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Australia harus menavigasi hubungannya dengan Tiongkok dengan hati-hati, karena Tiongkok juga merupakan mitra ekonomi yang penting bagi Australia.

Ancaman keamanan non-tradisional

Penyebaran polusi industri juga menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat. Penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia menjadi masalah kesehatan yang umum di daerah-daerah

dengan polusi udara yang tinggi. Selain itu, polusi air juga dapat menyebabkan penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan.

Berdasarkan masalah-masalah ini, pemerintah Australia telah mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari polusi. Beberapa tindakan ini termasuk meningkatkan regulasi industri, mendorong penggunaan teknologi bersih, dan memperkenalkan program pengurangan emisi seperti Skema Emisi Karbon Nasional.

Kesimpulan

Australia telah mengalami berbagai tantangan keamanan sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, termasuk ancaman komunisme, terorisme internasional, dan perubahan iklim setelah Perang Dingin selesai. Berakhirnya Perang Dingin membawa implikasi baru bagi keamanan regional, di mana pengaruh *Great Powers* semakin meningkat. Pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik menurun akibat kebijakan "*America First*" yang dicanangkan oleh Presiden Trump, sementara Tiongkok menjadi kekuatan yang semakin dominan. Australia harus menavigasi hubungannya dengan Great Powers dengan hati-hati, karena kebijakan luar negeri mereka dapat mempengaruhi stabilitas regional. Dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, Australia harus terus mengembangkan kebijakan luar negeri yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi global dan regional. Selain itu, Australia juga harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik untuk memperkuat stabilitas dan keamanan regional.

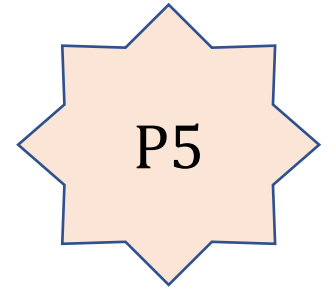
Australia harus terus memperkuat pertahanan dan keamanan nasionalnya agar dapat menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Pemerintah Australia harus memprioritaskan investasi dalam bidang pertahanan dan keamanan, termasuk meningkatkan anggaran

pertahanan, memodernisasi peralatan militer, dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra strategis di kawasan.

Australia juga harus menerapkan kebijakan luar negeri yang adaptif dan responsif, yang mampu menanggapi perubahan kondisi global dan regional dengan cepat. Kebijakan luar negeri Australia harus mencakup kerja sama ekonomi, keamanan, dan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan *Great Powers*. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca melalui daftar bacaan berikut ini:

1. Australian Department of Defence. (2021). 2020 Defence Strategic Update. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 dari <https://www.defence.gov.au/strategicupdate-2020/>
2. Australian Institute of International Affairs. (2020). Australia's strategic environment in 2020. Diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australias-strategic-environment-in-2020/>
3. Australian Strategic Policy Institute. (2020). Defence strategic update 2020: Setting a new course for Australia's defence. Diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.aspi.org.au/report/defence-strategic-update-2020>
4. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia's international security and defence policy. Diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security-and-defence/australias-international-security-and-defence-policy>
5. International Institute for Strategic Studies. (2020). The military balance 2020. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 dari <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2020>

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN *GREAT POWERS*: AMERIKA SERIKAT



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan hubungan Australia dengan *Great Powers*, sejarah hubungan Australia-AS, pola interaksi bilateral Australia-AS, kepentingan dan kebijakan luar negeri AS terhadap Australia.

MATERI PEMBELAJARAN

Australia dan Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan bilateral yang erat dalam banyak hal, terutama dalam bidang keamanan dan politik. Kedua negara memiliki nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas yang sama, serta memandang diri mereka sebagai sekutu utama dalam menghadapi ancaman keamanan regional dan global. Hubungan Australia-AS dimulai pada abad ke-20, ketika Australia menjadi koloni Britania Raya, dan berlanjut hingga saat ini sebagai salah satu hubungan bilateral yang paling penting di dunia.

Dalam artikel ini, kami akan membahas sejarah hubungan Australia-AS, pola interaksi bilateral antara kedua negara, serta kepentingan dan kebijakan luar negeri AS terhadap Australia. Hubungan Australia-AS dimulai pada awal abad ke-20, ketika Australia masih menjadi koloni Britania Raya. Pada saat itu, AS sedang menjadi kekuatan global yang semakin meningkat, dan memiliki hubungan ekonomi dan politik yang penting dengan Britania Raya. Seiring dengan perkembangan hubungan ekonomi dan politik antara AS dan Britania Raya, Australia semakin terlibat dalam hubungan dengan AS.

Selama Perang Dunia I, Australia dan AS bersekutu dengan Britania Raya dalam menghadapi Jerman dan negara-negara Blok Sentral lainnya. Setelah perang berakhir, Australia dan AS terus memperkuat hubungan mereka melalui perdagangan dan diplomasi. Selama Perang Dunia II, Australia dan AS sekali lagi bersekutu dengan Britania Raya, kali ini dalam menghadapi Jerman Nazi dan Jepang yang menyerang Pasifik. Setelah perang berakhir, Australia dan AS terus memperkuat hubungan mereka, termasuk melalui pembentukan aliansi keamanan regional, yaitu Perjanjian ANZUS pada tahun 1951.

Sejak pembentukan ANZUS, hubungan Australia-AS semakin meningkat, terutama dalam bidang keamanan dan politik. Australia terus menjadi sekutu AS dalam berbagai konflik internasional, termasuk Perang Vietnam dan Perang Teluk. Selain itu, kedua negara juga bekerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan regional, seperti terorisme dan nuklir Korea Utara.

Pola Interaksi Bilateral Australia-AS

Pola interaksi bilateral antara Australia dan AS dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk dalam perdagangan, investasi, diplomasi, dan keamanan. Kedua negara memiliki hubungan perdagangan yang kuat, dengan AS menjadi mitra dagang terbesar Australia dan Australia menjadi mitra dagang ke-8 terbesar AS. Investasi bilateral juga sangat penting, dengan AS menjadi investor terbesar di Australia dan Australia menjadi investor terbesar ke-6 di AS.

Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan diplomasi yang erat, dengan banyak pertemuan antara para pemimpin kedua negara dan kerjasama dalam berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Berbicara mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Australia, dapat dilihat bahwa AS memiliki beberapa kepentingan strategis di kawasan Pasifik yang mempengaruhi hubungannya dengan Australia. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama AS adalah keamanan regional dan pencegahan pengaruh negatif yang dapat mengancam stabilitas di kawasan tersebut. Seiring dengan itu, AS juga mempunyai kepentingan dalam perdagangan dan investasi di Australia yang menjadi faktor penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

Namun, pada tahun 2016, hubungan Australia-AS sempat mengalami ketegangan yang cukup serius ketika Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengkritik Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, atas kesepakatan migrasi yang telah dibuat antara kedua negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bilateral antara Australia dan AS. Meskipun demikian, hubungan kedua negara tersebut tetap terjalin dengan baik dan kembali menguat setelah kedatangan Presiden AS yang baru, Joe Biden, yang secara terbuka menunjukkan dukungan AS terhadap Australia dalam berbagai isu, termasuk keamanan regional dan perdagangan.

Maka dapat dipahami bahwa hubungan Australia-AS telah terjalin sejak lama dan memiliki banyak kepentingan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pola interaksi bilateral antara kedua negara juga telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dalam dunia politik dan ekonomi global. Meskipun terdapat beberapa ketegangan dan tantangan yang dihadapi, namun kedua negara tetap berupaya untuk memperkuat hubungan dan kerja sama mereka dalam berbagai bidang. Sebagai salah satu negara terbesar di kawasan Pasifik, Australia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, sehingga kerja sama dan

hubungan yang erat dengan AS akan terus menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

RELASI AUSTRALIA – INDIA

Hubungan bilateral antara Australia dan India telah berlangsung selama berabad-abad. Hubungan perdagangan dan budaya antara kedua negara terbentuk sejak masa kolonial Inggris. Namun, hubungan politik dan keamanan antara Australia dan India baru terjalin dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral antara Australia dan India mengalami perkembangan yang signifikan di sektor keamanan, politik dan ekonomi. Artikel ini akan membahas sejarah hubungan bilateral antara Australia dan India, fokus pada sektor keamanan, politik dan ekonomi.

Menurut sejarah hubungan bilateralnya, Australia dan India memiliki sejarah hubungan yang panjang yang dimulai pada abad ke-18. Hubungan perdagangan dan ekonomi menjadi fokus awal hubungan bilateral ini. Selama masa kolonial Inggris, India menjadi pusat perdagangan dan bisnis yang penting bagi Australia. Setelah kemerdekaannya pada 1947, India dan Australia mempertahankan hubungan perdagangan yang kuat dan berlanjut hingga saat ini.

Namun, hubungan keamanan dan politik antara Australia dan India baru terjalin setelah Perang Dingin. Pada 1991, Australia dan India menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang menguntungkan kedua negara. Selanjutnya, pada 2006, Australia dan India menandatangani perjanjian kerjasama keamanan, yang membuka jalan bagi hubungan keamanan dan politik yang lebih erat antara kedua negara.

Dalam konteks sektor Keamanan, sejak penandatanganan perjanjian kerjasama keamanan pada 2006, hubungan keamanan antara Australia dan India semakin berkembang. Kedua negara telah melakukan latihan militer bersama dan meningkatkan pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman keamanan regional yang sama. Pada 2014, Australia dan India menandatangani perjanjian pertahanan bilateral, yang menetapkan dasar kerjasama keamanan yang lebih erat antara kedua negara. Perjanjian ini mencakup pertukaran informasi intelijen, latihan militer bersama, dan peningkatan kerjasama dalam penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Selatan, termasuk India, telah membuat Australia semakin tertarik untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara di kawasan ini. Kedua negara telah menyadari perlunya untuk membangun hubungan keamanan yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional mereka di kawasan ini. Ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas telah membuat Australia dan India semakin bersemangat untuk memperkuat hubungan keamanan mereka.

Dari aspek sektor politik, hubungan politik antara Australia dan India telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara telah meningkatkan dialog politik dan pertukaran kunjungan antara para pemimpin mereka. Australia-India juga mempunyai kesamaan sebagai anggota G20, dan keduanya terlibat dalam berbagai forum kerjasama internasional seperti PBB, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Australia-India-Japan-US Consultations (Quad). Kerjasama dalam forum-forum tersebut menjadi penting dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Australia-India mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Pertama, Australia dianggap terlalu dekat dengan Amerika Serikat yang sedang memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik, sehingga dianggap oleh India sebagai ancaman. Kedua, adanya ketegangan di sekitar Laut Cina Selatan juga mempengaruhi hubungan Australia-India, dimana India memandang Australia sebagai pihak yang terlalu mendukung Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Ketiga, Australia menjadi tujuan migrasi bagi masyarakat India, namun sering terjadi kasus diskriminasi terhadap masyarakat India di Australia, yang menjadi perhatian bagi pemerintah India.

Kendati demikian, kedua negara terus melakukan upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral. Pada 2014, Australia dan India menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara di berbagai bidang, termasuk keamanan, perdagangan, investasi, energi, dan pendidikan. Australia juga menganggap India sebagai pasar yang potensial untuk produk-produk pertanian dan mineralnya, sehingga terus meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan.

Dalam sektor keamanan, Australia dan India terus menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan intelijen. Keduanya juga aktif dalam memerangi terorisme dan memperkuat keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama di bidang keamanan juga diwujudkan dengan adanya latihan militer bersama antara kedua negara, seperti latihan AUSINDEX dan Malabar.

Dalam bidang politik, Australia dan India terus memperkuat kerjasama di forum-forum internasional, seperti G20, APEC, dan ARF. Keduanya juga aktif dalam mempromosikan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Australia juga mendukung India dalam

mendapatkan tempat tetap di Dewan Keamanan PBB, serta dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan sipil.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara terus meningkatkan kerjasama di sektor perdagangan dan investasi. Pada 2019, nilai perdagangan bilateral mencapai AUD 30 miliar, dengan komoditas utama yang diperdagangkan adalah batu bara, minyak bumi, produk pertanian, dan jasa. Australia juga menjadi salah satu investor terbesar di sektor pertambangan dan energi di India. Keduanya juga bekerja sama dalam mengembangkan teknologi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam dekade terakhir, perdagangan antara kedua negara meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2018-2019, nilai perdagangan barang antara Australia dan India mencapai sekitar 30 miliar dollar AS. Australia juga menjadi salah satu mitra dagang penting bagi India dalam sektor pertanian, energi, dan mineral. Tidak hanya dalam perdagangan barang, Australia dan India juga berkomitmen untuk meningkatkan investasi bilateral dan hubungan bisnis. Pada tahun 2014, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui *Australia-India Strategic Research Fund (AISRF)* dengan total dana sebesar 100 juta dollar AS. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung penelitian dan inovasi di sektor energi terbarukan, pengolahan air dan lingkungan.

Selain itu, Australia dan India juga berupaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, keamanan pangan, dan kesehatan. Kedua negara juga berupaya untuk mengembangkan hubungan bisnis melalui inisiatif seperti India-Australia CEO Forum, yang mempertemukan para pemimpin bisnis dari kedua negara untuk membahas potensi kerja sama dan investasi.

Meskipun terdapat banyak peluang kerja sama antara Australia dan India, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya

adalah ketidakpastian politik di India dan Australia yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, terdapat juga persaingan di sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi perdagangan bilateral kedua negara.

Dalam konteks keamanan, Australia dan India juga terlibat dalam kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan. Australia dan India telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tahun 2006 dan perjanjian keamanan pada tahun 2009. Perjanjian-perjanjian tersebut memungkinkan kedua negara untuk mengadakan latihan militer bersama, berbagi intelijen dan teknologi, serta memperkuat kerja sama dalam hal pertahanan dan keamanan maritim.

Salah satu contoh kerja sama pertahanan dan keamanan antara Australia dan India adalah latihan militer bersama antara Angkatan Laut Australia dan India yang diadakan pada bulan April 2021. Latihan militer tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam melawan ancaman keamanan regional dan melindungi jalur perdagangan maritim di wilayah Asia-Pasifik.

Dalam bidang politik, Australia dan India juga memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Kedua negara saling mendukung dalam isu-isu keamanan regional seperti terorisme, perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan perubahan iklim.

Australia dan India memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Pada tahun 2018-2019, nilai perdagangan antara Australia dan India mencapai \$ 30,3 miliar, dengan India menjadi mitra perdagangan terbesar ke-5 Australia.

Australia dan India telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-India (AIFTA) pada tahun 2011. AIFTA bertujuan untuk meningkatkan

perdagangan barang dan jasa antara kedua negara. Selain itu, kedua negara juga telah menandatangani perjanjian investasi bilateral pada tahun 2016.

Namun, masih banyak potensi yang bisa digali dalam kerja sama ekonomi antara Australia dan India. Kedua negara harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi yang masih ada, seperti tarif, regulasi, dan infrastruktur.

Dalam sektor politik, Australia dan India memiliki persamaan pandangan dalam banyak isu global. Kedua negara memiliki komitmen untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, serta mendukung aturan hukum internasional dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Australia dan India juga memiliki hubungan yang erat dalam kerja sama pertahanan dan keamanan. Kedua negara telah mengadakan latihan militer bersama dan meningkatkan pertukaran intelijen dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme.

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral, Australia dan India telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis pada tahun 2009. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk keamanan, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.

Kesimpulannya, hubungan bilateral Australia-India telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor keamanan, politik, dan ekonomi. Kedua negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangka mencapai hal itu, kedua negara harus terus memperkuat komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, serta memperkuat hubungan antar rakyat.

Kerjasama Australia dan India mulai meningkat sejak pengesahan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) antara kedua negara pada tahun 2009. Sejak saat itu, perdagangan bilateral terus meningkat, mencapai AUD 30,3 miliar pada tahun 2019, naik dari AUD 15,6 miliar pada tahun 2010. Fokus perdagangan bilateral saat ini adalah pada energi, sumber daya, agribisnis, dan jasa. Kedua negara juga memiliki kemitraan strategis di sektor pertahanan, termasuk pertukaran intelijen dan latihan militer bersama.

Namun, hubungan bilateral ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Masalah terbesar adalah terkait dengan keamanan dan politik, terutama setelah India melakukan serangan udara ke Pakistan pada Februari 2019, yang memicu ketegangan di wilayah Kashmir. Australia, yang memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara, diharapkan untuk memainkan peran penting dalam membantu mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Selain itu, Australia juga telah menjadi tuan rumah beberapa pertemuan tingkat tinggi dengan India, seperti Konferensi Kemitraan Strategis Australia-India dan Dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Kedua forum ini membahas isu-isu strategis bilateral dan regional serta memperkuat kerjasama di bidang keamanan, pertahanan, dan ekonomi.

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral, Australia dan India juga telah menandatangani sejumlah perjanjian, antara lain Perjanjian Kemitraan Strategis pada tahun 2009, Perjanjian Kerja Sama Pemerintah untuk Perdagangan dan Investasi pada tahun 2014, serta Perjanjian tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bersama untuk Energi Bersih dan Teknologi pada tahun 2020. Selain itu, kedua negara juga memiliki kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.

Dalam hal ini, penting bagi Australia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan India, mengingat potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Terlebih lagi, kepentingan ekonomi Australia semakin bergantung pada Asia, termasuk India, sebagai pasar utama bagi produk-produk Australia. Selain itu, India juga memainkan peran penting dalam stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Australia.

Dalam kesimpulannya, hubungan bilateral antara Australia dan India dalam sektor keamanan, politik, dan ekonomi telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat beberapa permasalahan, kedua negara terus berupaya memperkuat kerja sama dan meningkatkan kemitraan strategis mereka. Kedua negara memiliki potensi besar untuk bekerja sama di berbagai bidang, dan hubungan bilateral yang kuat di antara keduanya dapat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Untuk elaborasi lebih lanjut, dapat merujuk pada daftar bacaan berikut ini:

1. Australian Government. (2019). Australia and India relationship. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/geo/india/Pages/india-country-brief>
2. Australian Government Department of Defence. (2013). Defence White Paper 2013. Retrieved from <https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2013-WP-Final.pdf>
3. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). India. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/geo/india/Pages/india-country-brief>
4. Department of Foreign Affairs and Trade. (2019). Australia's economic relationship with India. Retrieved from

- <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australias-economic-relationship-with-india.pdf>
5. Harris, S. (2018). India-Australia relations: A joint vision for the Indo-Pacific. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/india-australia-relations-joint-vision-indo-pacific>
 6. Ministry of External Affairs, Government of India. (2021). India-Australia relations. Retrieved from <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Australia-January-2021.pdf>
 7. Ministry of External Affairs, Government of India. (2021). India's bilateral relations with Australia. Retrieved from <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Australia-June-2021.pdf>
 8. Ministry of External Affairs, Government of India. (2021). Trade and investment. Retrieved from <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Australia-January-2021.pdf>
 9. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia. (2021). India country brief. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/geo/india/Pages/india-country-brief>
 10. Ramakrishnan, R. (2020). The Australia-India relationship: The way forward. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-india-relationship-way-forward>

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

- Mahasiswa secara berkelompok menentukan poin-poin utama Kerjasama Australia-AS
- Selanjutnya, poin-poin tersebut akan dipresentasikan dan didiskusikan dalam kelas selanjutnya.

AUSTRALIA DAN GREAT POWERS: JEPANG DAN TIONGKOK



P6

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan pola interaksi bilateral Australia- Jepang dan Australia-Tiongkok. Mahasiswa akan diarahkan untuk memahami sejarah hubungan Australia dan Jepang dan Tiongkok dan juga kepentingan dan kebijakan luar negeri Jepang dan Tiongkok terhadap Australia

HUBUNGAN AUSTRALIA- JEPANG

Sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik, Australia memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Sejarah telah membuktikan bahwa Australia pernah menghadapi berbagai ancaman keamanan, salah satunya adalah ancaman yang datang dari Jepang pada masa Perang Dunia II. Artikel ini akan membahas tentang sejarah Jepang sebagai ancaman keamanan bagi Australia pada masa Perang Dunia II, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyerangan Jepang ke Australia.

Pada awal Perang Dunia II, Australia merupakan sekutu dari Inggris yang berperang melawan Jerman dan Italia. Namun, pada saat yang sama, Jepang juga mulai menunjukkan ambisinya untuk memperluas kekuasaannya di Asia dan Pasifik. Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, Hawaii, dan memulai

serangkaian serangan ke sejumlah wilayah di kawasan Pasifik. Australia, sebagai salah satu negara yang berdekatan dengan Jepang, menjadi salah satu target dari serangan Jepang.

Pada tanggal 19 Februari 1942, Jepang menyerang Darwin, kota terbesar di wilayah utara Australia. Serangan ini merupakan serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh Jepang di Australia, dengan lebih dari 200 orang tewas dan sekitar 400 orang luka-luka. Selain Darwin, beberapa kota lain di Australia juga menjadi sasaran serangan Jepang, antara lain Sydney, Newcastle, dan Townsville.

Serangan-serangan Jepang tersebut menimbulkan ketakutan dan kepanikan di Australia. Pemerintah Australia pun mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Australia membangun pangkalan-pangkalan militer di wilayah utara dan menjalin kerja sama dengan negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat. Australia juga membentuk pasukan sukarelawan yang dikenal dengan sebutan "Kesatuan Perang Australia Utara" untuk membantu pertahanan wilayah utara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerangan Jepang ke Australia adalah kepentingan Jepang dalam memperluas wilayah kekuasaannya di Asia dan Pasifik, serta kelemahan pertahanan Australia pada saat itu. Selain itu, kebijakan luar negeri Jepang yang agresif dan keputusan Jepang untuk mengikuti aliansi dengan Jerman dan Italia juga turut mempengaruhi penyerangan ke Australia.

Sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Jepang, Australia menjadi lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara sekutu dan mengembangkan pertahanan nasional. Setelah Perang Dunia II berakhir, Australia juga semakin aktif dalam berpartisipasi dalam kerja

sama regional, seperti *ASEAN Regional Forum* dan *East Asia Summit*, untuk memperkuat stabilitas dan keamanan regional.

Pasca perang dunia kedua, Jepang dan Australia berusaha untuk memperbaiki hubungan bilateral mereka. Australia mengirimkan delegasi untuk mempelajari perekonomian Jepang dan pada tahun 1957, Perjanjian Komersial yang ditandatangani antara kedua negara. Pada tahun 1957 pula, Australia menjadi negara Barat pertama yang mengakui kedaulatan Jepang.

Namun, hubungan antara Australia dan Jepang tidak selalu mulus. Dalam dekade 1970-an, ketegangan muncul antara kedua negara, terutama dalam konteks perebutan sumber daya alam. Pada tahun 1973, Jepang menolak untuk membayar harga pasar untuk membeli daging sapi Australia, yang memicu ketegangan perdagangan antara kedua negara. Hal ini kemudian diikuti oleh berbagai perselisihan perdagangan lainnya seperti produk baja dan hasil pertanian.

Selain masalah perdagangan, permasalahan keamanan juga muncul dalam hubungan bilateral Australia-Jepang. Jepang terus dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Australia karena kedekatannya dengan Tiongkok dan Korea Utara yang pada saat itu juga menjadi ancaman regional. Pada tahun 1991, Australia mengeluarkan kebijakan pertahanan yang menyatakan bahwa Jepang tetap dianggap sebagai ancaman potensial, walaupun telah menandatangani Perjanjian Keamanan Bersama dengan Australia pada tahun 1960.

Namun, upaya Australia untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang terus dilakukan. Pada tahun 2002, Australia dan Jepang menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis, yang memperkuat hubungan kedua negara dalam berbagai bidang seperti keamanan, perdagangan, dan lingkungan hidup.

Hubungan Australia-Jepang adalah salah satu hubungan bilateral terpenting di kawasan Asia-Pasifik. Kedua negara memiliki sejarah panjang yang tidak selalu mulus, termasuk masa Perang Dunia II, namun saat ini, keduanya telah menjadi mitra dagang dan politik yang penting bagi satu sama lain. Sejak penandatanganan Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi pada tahun 1957, hubungan bilateral antara Australia dan Jepang terus berkembang dengan pesat.

Hubungan ekonomi antara Australia dan Jepang terus berkembang sejak tahun 1957. Jepang menjadi mitra dagang terbesar Australia di Asia dan Australia menjadi mitra dagang terbesar kedua Jepang di luar negeri. Pada tahun 2018, nilai perdagangan bilateral antara Australia dan Jepang mencapai sekitar AUD 87 miliar.

Secara general, pola interaksi bilateral antara Australia dan Jepang mencakup kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Dalam hal perdagangan, Australia dan Jepang memiliki kemitraan yang erat di sektor energi, sumber daya alam, dan agribisnis. Selain itu, keduanya juga bekerja sama dalam pengembangan teknologi dan inovasi.

Dalam bidang keamanan, Australia dan Jepang memiliki hubungan yang semakin erat. Keduanya bekerja sama dalam melawan ancaman keamanan regional, termasuk keamanan maritim dan penyebaran senjata nuklir di Asia. Australia dan Jepang juga telah bekerja sama dalam latihan militer dan berbagai proyek kerjasama pertahanan.

Selain itu, kebijakan luar negeri Australia juga sangat memperhatikan hubungan dengan Jepang. Australia menganggap Jepang sebagai mitra strategis penting dalam kawasan Asia-Pasifik, dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam kerangka organisasi multilateral seperti ASEAN dan Forum Asia Timur.

Selain itu, Australia juga mengupayakan kerja sama dengan Jepang dalam berbagai sektor, termasuk bidang keamanan dan pertahanan. Pada 2007, kedua negara menandatangani kesepakatan keamanan bilateral yang berisi komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan, intelijen, dan penanganan terorisme. Kerja sama ini semakin diperkuat pada tahun 2010 ketika kedua negara menandatangani kesepakatan pertahanan dan keamanan baru yang mencakup berbagai bidang, termasuk latihan militer bersama, pembelian peralatan pertahanan, dan kerja sama dalam pengembangan teknologi pertahanan.

Namun, kerja sama bilateral antara Australia dan Jepang tidak terlepas dari isu sejarah yang pernah terjadi antara kedua negara pada masa Perang Dunia II. Hubungan Australia-Jepang sempat memburuk pada tahun 2007 ketika mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, meminta maaf atas tindakan Jepang pada masa perang. Namun, hubungan kedua negara sejak itu telah membaik dan terus berkembang.

Kesimpulan

Sejarah hubungan Australia-Jepang memiliki banyak tantangan dan perubahan. Meskipun ada masa lalu yang tidak menyenangkan antara kedua negara, keduanya telah berhasil membangun hubungan bilateral yang kuat pada akhirnya. Pada saat ini, Australia dan Jepang terus memperkuat hubungan mereka dan bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan lingkungan hidup. Namun, tantangan dan permasalahan dalam hubungan bilateral masih muncul dan harus terus diatasi agar kedua negara dapat mencapai hubungan yang lebih baik di masa depan.

Australia dan Jepang memiliki hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan dalam berbagai sektor, terutama ekonomi. Hubungan ini

dipengaruhi oleh sejarah keduanya, terutama masa Perang Dunia II. Namun, kedua negara terus berupaya untuk memperkuat kerja sama dan menjaga hubungan yang baik. Australia dan Jepang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, dan keduanya telah melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Walaupun masih terdapat beberapa isu sensitif, seperti masalah perikanan dan isu sejarah, namun kedua negara tetap berkomitmen untuk membangun hubungan bilateral yang lebih kuat di masa depan.

HUBUNGAN AUSTRALIA-TIONGKOK

Sejak akhir Perang Dunia II, Australia telah memandang China sebagai salah satu ancaman keamanan, ideologi, dan ekonomi terbesar bagi negara tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab, sebab sejarah hubungan kedua negara telah terjalin selama berabad-abad, termasuk selama masa Perang Dunia II dan Perang Korea.

Sejarah hubungan Australia dan China dimulai pada abad ke-19, ketika Australia menjadi tujuan imigrasi para pekerja China untuk menggarap lahan pertanian. Namun, hubungan kedua negara mulai memburuk pada awal abad ke-20, ketika China mengalami perpecahan internal dan perang saudara, serta invasi Jepang.

Pada masa Perang Dunia II, Australia dan China sama-sama berjuang melawan invasi Jepang. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, hubungan antara kedua negara semakin memburuk, terutama setelah kejatuhan Kuomintang dan berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1949. Australia menjadi salah satu negara yang mengakui Taiwan sebagai pemerintah sah China, yang mengakibatkan hubungan dengan China semakin sulit.

Pasca Perang Dunia II, hubungan Australia-China memburuk seiring dengan semakin kuatnya pengaruh ideologi komunis di China. Pada tahun 1949, Partai Komunis China berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Republik Rakyat China yang baru di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi Australia dan negara-negara Barat lainnya karena ideologi komunis dianggap sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi dan kapitalisme Barat.

Selama Perang Dingin, Australia menjadi sekutu AS dan memandang Komunisme sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Barat dan demokrasi. China dianggap sebagai negara yang mendukung dan mempromosikan ideologi Komunis ini.

Sejak itu, Australia mengambil posisi yang keras dalam kebijakan luar negerinya terhadap China. Pada awalnya, Australia bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menerapkan embargo senjata dan ekonomi terhadap China. Namun, pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, Australia mulai membuka kembali hubungan ekonominya dengan China.

Namun, hubungan bilateral antara Australia dan China kembali memburuk pada akhir 1990-an ketika Australia mengambil sikap yang keras dalam kasus peretasan oleh China terhadap jaringan komunikasi pemerintah dan militer Australia.

Selain ancaman ideologi dan keamanan, China juga menjadi ancaman ekonomi bagi Australia. China menjadi salah satu mitra dagang terbesar Australia, tetapi hubungan perdagangan kedua negara menjadi semakin rumit dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Australia menjadi salah satu negara pertama yang menolak program Belt and Road Initiative yang digagas China, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur global.

Hubungan kembali memanas pada tahun 2018 ketika Australia menuduh China melakukan campur tangan dalam politik Australia, terutama dalam hal pemilihan dan pengaruh di lembaga-lembaga politik dan keamanan.

Ancaman ekonomi dari China juga menjadi isu yang penting dalam hubungan bilateral Australia-China. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China merupakan pasar ekspor yang penting bagi Australia. Namun, tindakan proteksionis dan pengaruh ekonomi yang kuat dari China menyebabkan kekhawatiran bagi Australia.

Pada akhir 2020, hubungan bilateral Australia-China semakin memburuk ketika Australia menuntut penyelidikan internasional independen terhadap asal-usul COVID-19 di Wuhan, China. Hal ini memicu kemarahan China, yang mengambil sejumlah langkah balasan seperti pembatasan impor dari Australia dan pengumuman larangan wisatawan China untuk mengunjungi Australia. China juga merespons dengan mengambil tindakan ekonomi, termasuk membatasi impor beberapa produk Australia seperti gandum, anggur, dan daging sapi.

Dalam menghadapi ancaman keamanan, ideologi, dan ekonomi dari China, Australia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dengan sekutu dan mitra dagang lainnya, termasuk AS, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara. Australia juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan nasional, termasuk peningkatan pengeluaran untuk militer dan investasi dalam teknologi militer.

Dalam beberapa tahun terakhir, Australia juga telah meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Vietnam, sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada China.

Dalam konteks sejarah, ancaman ideologi dan ekonomi dari China terhadap Australia dapat dilihat sebagai bagian dari persaingan hegemonik antara negara-negara besar di dunia. Sejak tahun 2013, China meluncurkan inisiatif Belt and Road, sebuah program investasi global yang menargetkan infrastruktur dan proyek-proyek pengembangan di seluruh dunia. Australia, bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, menganggap inisiatif ini sebagai upaya China untuk memperluas pengaruhnya secara global dan menyaingi kekuatan-kekuatan Barat.

Selain itu, posisi Australia sebagai sekutu Amerika Serikat juga memainkan peran dalam hubungan bilateral Australia-China. Amerika Serikat telah memandang China sebagai ancaman keamanan dan ekonomi yang serius, dan Australia memainkan peran penting dalam strategi AS di Asia Pasifik. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperumit hubungan Australia dengan China, terutama karena tindakan Australia dalam mendukung kebijakan AS

Selanjutnya, melalui implementasi konsep ASIA, Australia mempromosikan hubungan dengan negara-negara di Asia sebagai bagian dari strategi luar negerinya. Australia juga mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan negara-negara di Asia seperti Jepang, China, India, dan Korea Selatan untuk memperkuat hubungan ekonomi, keamanan, dan budaya.

Namun, hubungan Australia dengan China menjadi tegang dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai isu seperti hak asasi manusia, keamanan, dan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, China mengambil tindakan keras terhadap ekspor Australia, yang dianggap sebagai tindakan pembalasan atas sikap Australia yang keras terhadap China. Perdagangan antara kedua negara terus menurun sejak itu, dan hubungan bilateral semakin tegang.

Dalam hal ini, Australia harus menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ancaman yang muncul dari China. Pada tahun 2020, pemerintah Australia merilis sebuah kebijakan pertahanan yang dikenal sebagai "Force Structure Plan", yang memperkenalkan rencana pertahanan jangka panjang Australia hingga 2030. Kebijakan ini menetapkan bahwa Australia akan meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan membeli lebih banyak pesawat tempur F-35, kapal perang, kapal selam, dan senjata lainnya untuk melindungi negara dari kemungkinan ancaman asing, termasuk dari China.

Selain meningkatkan kemampuan pertahanannya, Australia juga melakukan upaya diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara lain untuk membentuk aliansi yang kuat untuk melawan ancaman dari China. Pada bulan November 2020, Australia menandatangani kesepakatan perdagangan yang disebut *RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)* dengan 14 negara lain di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan Australia pada China dalam hal perdagangan.

Selain itu, Australia juga berupaya untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk memperkuat kekuatan militer dan keamanan di kawasan Pasifik. Pada bulan Maret 2021, Australia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan pertahanan yang disebut *AUKUS (Australia-United Kingdom-United States Security and Defense Cooperation)*, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang teknologi pertahanan, intelijen, dan kemampuan pertahanan lainnya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, sejarah hubungan Australia dengan China menunjukkan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara telah

mengalami banyak perubahan dan tantangan. Dalam Perang Dunia II, China dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Australia karena perang antara China dan Jepang yang mempengaruhi keamanan Australia. Namun, hubungan antara kedua negara membaik setelah kemerdekaan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral antara Australia dan China menjadi tegang karena berbagai isu yang mencakup hak asasi manusia, keamanan, dan pandemi COVID-19. Konflik antara kedua negara telah mempengaruhi perdagangan dan hubungan ekonomi mereka.

Namun, Australia terus mendorong hubungan dengan negara-negara di Asia melalui implementasi konsep ASIA sebagai bagian dari strategi luar negerinya. Hubungan Australia dengan Jepang dan India telah terus berkembang dan menguat dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai negara kecil yang terletak di kawasan yang dinamis dan strategis, Australia harus terus menghadapi berbagai tantangan keamanan dan politik. Dengan menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan, dan membangun kekuatan militer yang kuat, Australia dapat terus menjaga stabilitas dan keamanan dalam kawasan. Namun, Australia juga perlu menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar seperti China dan AS dan terus berupaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia dan Pasifik.

Australia telah mengalami berbagai ancaman keamanan dari negara-negara besar seperti Jepang dan China dalam sejarahnya. Ancaman-ancaman tersebut mendorong Australia untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya sendiri dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk membentuk aliansi yang kuat dalam melindungi keamanan regional.

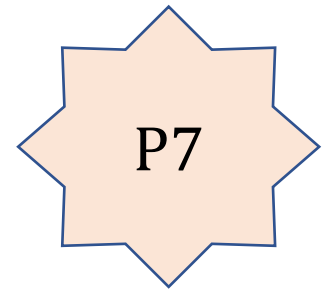
Pada saat ini, Australia menghadapi ancaman yang cukup serius dari China, terutama dalam hal ancaman ekonomi dan ideologi. Australia harus terus meningkatkan kemampuan pertahanannya dan memperkuat kerja

sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, Australia harus memperhatikan hubungan dengan China dan mencoba membangun kembali hubungan yang baik dengan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Untuk elaborasi lebih lanjut, silakan baca sejumlah daftar bacaan berikut ini:

1. Australia-Japan Foundation. (2019). Australia-Japan relations. Diakses pada 8 Februari 2022, dari <https://www.australia.or.jp/en/about-australia/australia-japan-relations.html>
2. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2020). Australia-Japan relationship. Diakses pada 8 Februari 2022, dari <https://www.dfat.gov.au/geo/japan/Pages/australia-japan-relationship>
3. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia-Japan relations. Diakses pada 8 Februari 2022, dari <https://www.dfat.gov.au/geo/japan/Pages/australia-japan-relationship>
4. Department of Defence. (2017). Australia-Japan Defence Relationship. Diakses pada 8 Februari 2022, dari <https://www.defence.gov.au/Initiatives/InternationalEngagement/AustraliaJapanDefenceRelationship/>
5. The Sydney Morning Herald. (2020). Australia and Japan agree to closer military ties. Diakses pada 8 Februari 2022, dari <https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-and-japan-agree-to-closer-military-ties-20201117-p56fen.html>
6. Australian Department of Defence. (1991). Defence: Australia's White Paper. Australian Government Publishing Service.

7. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2018). Australia-Japan Relations. <https://www.dfat.gov.au/geo/japan/Pages/australia-japan-relations>
8. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia-Japan Joint Declaration on Security Cooperation. <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/defence-cooperation/australia-japan-joint-declaration-security-cooperation>
9. Chubb, P. (2017). Japan's security and the Australia-Japan relationship. *Japan Forum*, 29(1), 1-15.
10. Australian Government Department of Defence. (2021). 2020 Defence Strategic Update. Retrieved from <https://www.defence.gov.au/StrategicUpdate-2020/>
11. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia's Foreign Relations. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/geo>
12. Leach, M. (2019). The US-Australia alliance and regional security in the Indo-Pacific. *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 116-131.
13. McCormack, T. (2021). Address to the National Press Club. Retrieved from <https://www.nationalpressclub.org.au/events/tom-mccormack/>
14. Suryadinata, L., Arifin, E. N., & Ananta, A. (2015). Australia-China Relations: From Cold War to a Comprehensive Strategic Partnership
15. Australian Government Department of Defence. (2020). 2020 Defence Strategic Update and 2020 Force Structure Plan. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://www.defence.gov.au/strategicupdate-2020/>
16. Bilveer Singh. (2016). China's Rise and its Implications for Australia's Security. *Journal of Defence and Security*, 7(3), 44-62.
17. Buzan, B., & Herring, E. (1998). The Arms Dynamic in East Asia. *Journal of Strategic Studies*, 21(1), 1-39.

AUSTRALIA DAN *GREAT POWERS*: RUSIA DAN INDIA



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan pola interaksi bilateral Australia dengan Rusia dan India. Mahasiswa juga akan diarahkan untuk memahami sejarah hubungan Australia dengan Rusia dan India, serta kepentingan dan kebijakan luar negeri Rusia dan India terhadap Australia.

RELASI AUSTRALIA-RUSIA

Australia, sebagai negara pulau yang terpisah dari daratan besar, selalu merasa rentan terhadap ancaman dari luar. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa Australia terletak di antara dua samudra besar dan berdekatan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan Australia. Dalam sejarahnya, Australia pernah mengalami beberapa ancaman keamanan yang serius, salah satunya berasal dari Rusia.

Rusia, sebagai salah satu kekuatan besar di dunia, pernah menjadi ancaman bagi Australia pada masa Perang Dunia II. Rusia, yang saat itu dikenal sebagai Uni Soviet, memiliki ambisi untuk menyebarluaskan ideologi komunis ke seluruh dunia, termasuk di Australia. Di samping itu, Uni Soviet juga memiliki kepentingan ekonomi dan militer di Asia dan Pasifik yang dapat berdampak pada keamanan Australia.

Ancaman keamanan dari Rusia pada masa Perang Dunia II terutama terkait dengan ekspansi Uni Soviet di Asia dan Pasifik. Uni Soviet memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan Pasifik untuk

mengimbangi kekuatan Inggris dan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Upaya ini ditunjukkan oleh Uni Soviet dengan mengirimkan agen-agen rahasia untuk melakukan spionase dan sabotase di Australia.

Salah satu aksi spionase yang terkenal adalah kasus Petrov. Pada tahun 1954, seorang agen rahasia Soviet bernama Vladimir Petrov membelot ke Australia dan membawa dokumen-dokumen rahasia Uni Soviet yang membuktikan adanya kegiatan spionase di Australia. Dokumen-dokumen tersebut mencakup bukti bahwa Uni Soviet telah memasang alat penyadap di kedutaan besar Australia di Moskow dan telah merekrut agen-agen rahasia di Australia.

Ancaman ideologi dari Rusia pada masa Perang Dunia II terutama terkait dengan penyebaran ideologi komunis di Australia. Uni Soviet memiliki ambisi untuk menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia, termasuk di Australia. Pada tahun 1945, Partai Komunis Australia (CPA) memiliki sekitar 20.000 anggota dan mendukung Uni Soviet dalam Perang Dunia II.

Sejak 1917, Uni Soviet menjadi negara komunis pertama di dunia dan mulai menyebarluaskan ideologi tersebut ke seluruh dunia. Australia sebagai negara liberal demokrasi merasa terancam oleh ideologi komunis yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang dianutnya. Sebagai negara komunis yang sangat mengutamakan ideologi dan keamanan dalam pengambilan kebijakan, Rusia dan aliansinya dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Hal ini membuat Australia bersikap skeptis terhadap kebijakan dan tindakan Rusia, terutama terkait dengan pengaruhnya di Asia Tengah dan Timur.

Kecemasan terhadap ancaman Soviet meningkat pada awal 1950-an. Australia bergabung dengan Perjanjian ANZUS pada tahun 1951 bersama dengan AS dan Selandia Baru, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang

terlibat akan membela satu sama lain jika diserang oleh negara lain di wilayah Pasifik. Ini menegaskan kembali keterikatan keamanan Australia dengan AS, dan memperkuat peran Amerika Serikat sebagai sekutu strategis Australia.

Pemerintah Australia melihat hal ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, karena mereka khawatir bahwa kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet di Asia dan Pasifik dapat mengancam kepentingan Australia. Oleh karena itu, pemerintah Australia mengambil tindakan keras terhadap CPA dan melarang partai tersebut pada tahun 1951.

Tak hanya itu, Uni Soviet juga diketahui memiliki kebijakan luar negeri yang agresif dalam menyebarkan ideologi komunis ke negara lain. Salah satu contohnya adalah invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 yang mengkhawatirkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Australia. Australia melihat invasi tersebut sebagai tindakan agresif dan mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Australia mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan dan keamanannya, termasuk melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dalam program ANZUS.

Ancaman ketiga yang dihadapi oleh Australia adalah ancaman ekonomi dari Uni Soviet. Sejak awal Perang Dingin, Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya memberlakukan embargo ekonomi terhadap negara-negara Barat termasuk Australia. Hal ini berdampak pada perdagangan dan investasi Australia dengan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya. Australia merasa terisolasi dan tidak bisa berkembang secara ekonomi karena kebijakan tersebut. Belakangan, Rusia tetap tidak dianggap sebagai partner yang aman bagi Australia. Meskipun keduanya telah memiliki hubungan ekonomi yang kuat, seperti kerja sama dalam ekspor impor minyak, gas, dan bijih besi, namun hubungan ini juga tidak

terlepas dari risiko yang terkait dengan ketergantungan pada negara yang sedang dalam situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, Rusia juga terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi dan kebijakan ekonominya yang cenderung proteksionis, yang membuat Australia merasa khawatir terkait dengan risiko bisnis dan investasi di Rusia.

Selama Perang Dingin, Australia terlibat dalam konflik Korea dan Vietnam sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Amerika Serikat. Australia juga menerapkan kebijakan "Pencegahan Komunis" yang keras melalui tindakan legislatif seperti Undang-Undang Anti-Komunis tahun 1950 dan pemberlakuan larangan Partai Komunis Australia pada tahun 1951.

Namun, ketegangan dengan Uni Soviet mulai menurun pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, terutama setelah konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955. Australia mulai memperluas hubungannya dengan Uni Soviet pada akhir 1950-an, dengan mengirim delegasi perdagangan ke Moskow dan menandatangani perjanjian perdagangan pada tahun 1962.

Pada tahun 1972, Partai Buruh Australia memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan baru dengan Gough Whitlam sebagai perdana menteri. Whitlam membawa perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Australia, termasuk mendirikan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1972. Ini merupakan langkah penting dalam mengubah kebijakan luar negeri Australia yang lebih pro-Amerika Serikat.

Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Australia memperluas kembali hubungan diplomatiknya dengan Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tahun 2007, kedua negara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Keamanan, yang memberikan landasan bagi kerja sama bilateral dalam berbagai bidang keamanan.

Meskipun demikian, setelah Perang Dingin berakhir, Australia berhasil memperkuat hubungan ekonomi dengan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya. Pada tahun 1989, Uni Soviet mengalami keruntuhan dan negara-negara Blok Timur lainnya mulai mengalami perubahan menuju demokrasi dan perekonomian pasar bebas. Hal ini membuka peluang bagi Australia untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara tersebut. Saat ini, Australia memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya.

Meskipun sejarah hubungan Australia-Rusia telah melalui pasang surut, keterikatan Australia pada kebijakan luar negeri yang dipimpin oleh Amerika Serikat masih kuat. Namun, saat ini Australia semakin mencari cara untuk memperluas hubungannya dengan negara-negara lain di wilayah Pasifik dan Asia, termasuk Tiongkok dan Rusia. Australia juga memainkan peran yang semakin penting dalam berbagai forum keamanan regional dan internasional, termasuk G20, ASEAN Regional Forum, dan East Asia Summit.

Kesimpulan

Sejarah menunjukkan bahwa Australia pernah menghadapi berbagai ancaman keamanan dari negara-negara seperti Jepang, China, dan Rusia. Ancaman-ancaman ini bukan hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman ideologi dan ekonomi. Australia berhasil menghadapi ancaman-ancaman ini melalui strategi keamanan nasional yang kuat dan kerjasama internasional dengan negara-negara sekutu.

Dalam era modern saat ini, Australia masih dihadapkan pada ancaman keamanan yang kompleks dan beragam. Ancaman-ancaman ini termasuk terorisme, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan. Australia terus

memperkuat strategi keamanan nasionalnya dan bekerja sama dengan negara-negara sekutu untuk mengatasi ancaman-ancaman ini.

Sejarah hubungan Australia dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, dan Rusia telah memengaruhi kebijakan luar negeri Australia dan memengaruhi hubungan politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Pasifik dan Asia. Keterikatan Australia pada AS masih kuat, tetapi semakin mencari cara untuk memperluas jaringan hubungannya dengan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Sejarah hubungan Australia dengan Rusia mengalami pasang surut, terutama selama periode Perang Dunia II hingga Perang Dingin. Rusia pernah menjadi ancaman keamanan bagi Australia, tetapi juga menjadi mitra dagang dan diplomasi penting pada beberapa periode tertentu. Perubahan situasi global dan kebijakan luar negeri Australia yang semakin terbuka dan multilateral membawa dampak positif bagi hubungan Australia-Rusia pada akhir 1980-an dan 1990-an.

Namun, seiring dengan perubahan situasi global dan kebijakan luar negeri Australia yang semakin terbuka dan multilateral, hubungan Australia-Rusia membaik pada akhir 1980-an dan 1990-an. Hal ini ditandai dengan kunjungan Presiden Rusia Boris Yeltsin ke Australia pada tahun 1992, kunjungan Perdana Menteri Australia John Howard ke Rusia pada tahun 2000, dan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Australia pada tahun 2007.

Namun, perubahan situasi global pasca-11 September 2001 kembali memperumit hubungan Australia-Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 dan aneksasi Crimea, Australia mengambil tindakan yang tegas dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal ini membuat hubungan kedua negara semakin memanas, meskipun ada upaya-upaya untuk menjaga dialog dan diplomasi.

Namun, konflik baru antara Rusia dan negara-negara Barat pasca-11 September 2001 kembali memperumit hubungan bilateral kedua negara. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan yang berkembang di dunia internasional saat ini, Australia perlu mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan semua negara, termasuk Rusia. Diplomasi dan dialog yang terus-menerus dapat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas regional dan keamanan internasional.

Dalam konteks saat ini, hubungan Australia-Rusia masih diwarnai oleh ketegangan terkait dengan beberapa isu seperti krisis di Suriah, aneksasi Krimea, dan serangan Siberia. Australia bersikap tegas terkait dengan isu-isu ini dan mengambil langkah-langkah seperti penerapan sanksi dan pengusiran diplomat Rusia di Australia. Namun, Australia juga tetap membuka pintu untuk dialog dan kerja sama dengan Rusia dalam beberapa isu terkait seperti pencegahan terorisme dan pengendalian senjata nuklir.

Secara keseluruhan, sejarah hubungan Australia-Rusia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan dinamika politik, ekonomi, dan keamanan global. Meskipun kedua negara telah memiliki sejarah kerja sama yang panjang di berbagai bidang, namun ancaman keamanan, ideologi, dan ekonomi yang dihadapi oleh Australia dari Rusia telah membuat hubungan ini terus berada dalam situasi yang penuh ketegangan. Namun, Australia juga tetap membuka pintu untuk kerja sama dalam beberapa isu terkait demi mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

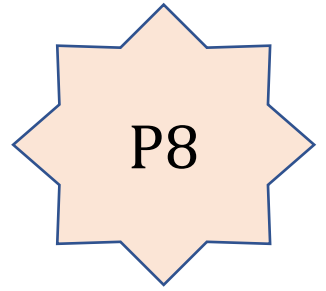
Situasi ini membawa implikasi besar bagi hubungan Australia-Rusia di masa depan. Australia terus memandang Rusia sebagai ancaman keamanan dan menempatkan sanksi ekonomi atas tindakan Rusia di Ukraina dan intervensinya dalam pemilihan AS. Namun, Australia juga berupaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Rusia di bidang ekonomi dan

perdagangan. Pada tahun 2020, Rusia menjadi salah satu negara pengimpor gandum terbesar Australia, dengan nilai ekspor mencapai 1,3 miliar dolar. Meskipun begitu, Australia terus memperkuat hubungan dengan negara-negara sekutu seperti AS dan Inggris dalam menghadapi ancaman keamanan yang berasal dari Rusia. Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa menelusuri bahan bacaan berikut ini:

1. Australian Government, Department of Defence. (2016). The strategic context for the 2016 Defence White Paper. Canberra: Commonwealth of Australia.
2. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia's national interests. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/geo/national-interests>
3. Graham, E. (2018). Australia's strategic culture and national security policy. London: Routledge.
4. Huisken, R. (2016). Australia's national security strategy: An overview. *Australian Journal of International Affairs*, 70(1), 1-7.
5. Rayner, J. (2020). Australia's changing security environment. In D. Blaxland, M. O'Neill, & S. Chia (Eds.), *Australia's defence: Towards a new era?* (pp. 39-52). Canberra: ANU Press.
6. Thakur, R. (2017). Australia's security dilemmas in the Asian century. *Asian Journal of Political Science*, 25(1), 1-18.
7. Commonwealth of Australia. (2014). *Australia's National Security: Challenges and Opportunities*. Canberra: Department of Defence.
8. Hill, R. (2014). *Australia's National Security: An Introduction*. Melbourne: Oxford University Press.

9. The National Archives of Australia. (n.d.). The Cold War. Diakses pada 25 Januari 2022, dari <https://www.naa.gov.au/explore-collection/australias-cold-war/overview>.

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

KETERLIBATAN AUSTRALIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONALISME



P9

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai peran dan keterlibatan Australia dalam organisasi internasional dan regional, khususnya terkait dengan APEC, ASEAN dan ARF. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan peran dan kepentingan Australia dalam organisasi internasional dan regionalisme.

MATERI PEMBELAJARAN

Dalam era globalisasi saat ini, negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang memerlukan kerja sama internasional untuk mencapai solusi yang efektif. Australia sebagai salah satu negara maju di kawasan Pasifik Selatan telah berperan aktif dalam organisasi internasional dan regional. Artikel ini akan membahas peran dan keterlibatan Australia dalam tiga organisasi utama, yaitu APEC, ASEAN, dan ARF.

Terkait peran Australia dalam APEC, APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) sendiri merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik, termasuk Australia. Tujuan utama dari APEC adalah meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi antara anggota untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Australia telah menjadi anggota APEC sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1989.

Australia memainkan peran penting dalam APEC. Sebagai negara maju dengan perekonomian yang kuat, Australia telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kerja sama ekonomi di kawasan ini. Selain itu, Australia juga aktif mempromosikan isu-isu seperti penghapusan hambatan perdagangan, reformasi pasar, dan pengembangan sektor swasta. Australia juga telah berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara anggota APEC dan mengembangkan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan perdagangan bebas.

Selain berperan sebagai anggota aktif, Australia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan APEC pada tahun 1989 dan 2007. Pertemuan APEC yang diadakan di Sydney pada tahun 2007 dihadiri oleh para pemimpin negara dan pemerintahan dari seluruh anggota APEC. Pertemuan tersebut menjadi sukses besar dan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Australia juga berperan dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), yang notabene menjadi organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan utama dari ASEAN adalah meningkatkan kerja sama regional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Australia sendiri bukan anggota dari ASEAN, namun telah memiliki hubungan yang erat dengan organisasi ini.

Australia menjadi partner dialog ASEAN pada tahun 1974 dan menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994. Sebagai partner dialog, Australia memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Australia juga aktif dalam memberikan bantuan pembangunan dan dukungan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN.

Australia juga aktif dalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik. Pada 1971, Australia menjadi negara pertama di luar wilayah Pasifik Selatan yang menjadi anggota Forum Kepulauan Pasifik (*South Pacific Forum*) yang dibentuk untuk mempromosikan kerja sama antara negara-negara kepulauan Pasifik dalam hal perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi. Kemudian, pada 2000, forum tersebut berganti nama menjadi Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum*) untuk merefleksikan perubahan keanggotaan dan lingkup kerja sama. Australia terus aktif dalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik dan menjadi kontributor terbesar dalam bantuan pembangunan dan kemanusiaan di kawasan ini.

Australia terlibat dalam kerja sama internasional dan regional dalam hal perdagangan dan investasi. Australia menjadi anggota pendiri APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) pada 1989, sebuah forum yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Dalam kerangka APEC, Australia terlibat dalam kerja sama dengan negara-negara Asia-Pasifik dalam hal pengurangan hambatan perdagangan, liberalisasi investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Pada 2019, Australia menjadi tuan rumah APEC Summit di Sydney.

Selain APEC, Australia juga memiliki hubungan yang kuat dengan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan terlibat dalam kerja sama dengan organisasi ini dalam hal perdagangan, investasi, dan isu-isu keamanan. Australia menjadi mitra dialog ASEAN sejak 1974 dan menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF) pada 1994, sebuah forum yang bertujuan untuk mempromosikan dialog keamanan dan kerja sama di Asia Timur. Australia juga terlibat dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam hal pengembangan ekonomi, investasi, dan kerja sama keamanan.

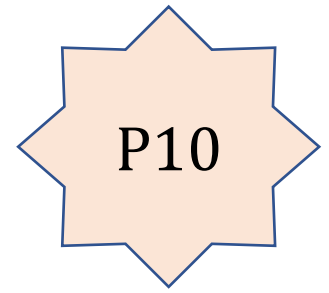
Dalam kerangka regional, Australia juga terlibat dalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan dan menjadi anggota pendiri PIF (*Pacific Islands Forum*) yang dibentuk pada 1971. PIF bertujuan untuk mempromosikan kerja sama antara negara-negara kepulauan Pasifik dalam hal perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi. Australia juga terlibat dalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik dalam hal pengembangan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama keamanan.

Keterlibatan Australia dalam organisasi internasional dan regional menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan kerja sama dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan Pasifik Selatan. Sebagai negara yang terletak di tengah-tengah kawasan tersebut, Australia menyadari pentingnya membangun kerja sama yang kuat dengan negara-negara tetangganya untuk mencapai keamanan, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan tersebut. Silakan baca materi berikut ini:

1. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia's involvement in Pacific regional organisations. <https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/regional>
2. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia and APEC. Diakses pada 10 Januari 2022, dari <https://www.dfat.gov.au/geo/apec/Pages/apec>
3. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia and ASEAN. Diakses pada 10 Januari 2022, dari <https://www.dfat.gov.au/geo/asean/Pages/australia-and-asean>
4. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia and ARF. Diakses pada 10 Januari 2022, dari <https://www.dfat.gov.au/geo/asean/Pages/australia-and-arf>

5. Breslin, S., & Kim, R. (2018). ASEAN and Australia: Partnerships and Prospects. *Asian Economic Policy Review*, 13(1), 46-62.
6. Collins, A. (2017). Australia and the Asia-Pacific: Challenge and Opportunity. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(1), 1-19.
7. Dinnen, S., & Firth, S. (2018). Australia and the Pacific: Troubled Engagement. *Australian Journal of International Affairs*, 72(2), 99-106.
8. Emmerson, D. (2018). Australia and the ASEAN-led Regional Architecture. *Asian Economic Policy Review*, 13(1), 63-79.
9. Gyngell, A. (2019). Fear of Abandonment: Australia in the World Since 1942. *Quarterly Essay*, 75, 1-111.
10. Singh, B. (2019). Australia and India: A New Alliance in the Making? *Asian Affairs*, 50(1), 21-39.
11. Thayer, C. (2019). Australia's Relationship with ASEAN: From Dialogue Partner to Strategic Partner? *Contemporary Southeast Asia*, 41(1), 1-26.

PENGANTAR MENGENAI NEGARA-NEGARA PASIFIK



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami dan bisa menjelaskan tentang negara-negara Pasifik secara umum dan juga memahami permasalahan di negara-negara Pasifik secara kritis dan konstruktif.

PENGARUH AUSTRALIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Pengaruh Australia terhadap dinamika politik, keamanan, dan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan menjadi penting karena Australia merupakan salah satu kekuatan utama di wilayah tersebut. Wilayah Pasifik Selatan adalah daerah yang terdiri dari beberapa negara kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik, termasuk Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Artikel ini akan membahas pengaruh Australia dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan serta tantangan yang dihadapi oleh Australia dalam mempertahankan posisinya di wilayah tersebut.

Sejarah hubungan Australia dengan kawasan Pasifik Selatan dimulai sejak era kolonial. Sebagai kekuatan kolonial di wilayah tersebut, Australia memiliki pengaruh yang kuat di beberapa negara kepulauan seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Fiji. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, negara-negara ini masih mempertahankan hubungan erat dengan Australia terutama dalam bidang politik dan keamanan. Australia sering kali menawarkan bantuan untuk membantu negara-negara tersebut

dalam menghadapi masalah keamanan seperti terorisme dan perdagangan narkoba.

Sebagai negara maju dengan sistem politik demokrasi liberal, Australia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan Pasifik Selatan. Australia juga merupakan anggota aktif dari forum politik regional seperti Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) dan PIF (Pacific Islands Forum), yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama regional dan konsultasi antara negara-negara anggota. Sejak bergabung pada tahun 1971, Australia telah menyumbangkan banyak sumber daya dan dukungan keuangan bagi organisasi ini. Selain itu, Australia juga terlibat dalam berbagai forum keamanan dan politik di kawasan Pasifik Selatan, seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan South Pacific Commission (SPC). Melalui forum-forum ini, Australia dapat memperkuat kerja sama regional dalam berbagai isu keamanan dan politik, seperti penanggulangan bencana, perlindungan maritim, dan perdagangan bebas.

Sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar di kawasan, Australia telah mengambil peran yang aktif dalam membantu menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Australia telah berpartisipasi dalam beberapa operasi penjagaan perdamaian di Pasifik Selatan, seperti operasi pasukan gabungan UNIFIL di Timor Leste dan Solomons, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kapasitas keamanan lokal.

Selain itu, Australia juga terus memperkuat hubungan keamanan bilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan melalui kerja sama keamanan dan pertahanan. Contohnya, Australia telah membantu membangun kekuatan militer Tonga, Fiji, dan Papua Nugini. Australia juga

telah mengadakan latihan militer bersama dengan negara-negara di kawasan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapasitas pertahanan.

Namun, pengaruh Australia dalam dinamika keamanan kawasan Pasifik Selatan juga telah menimbulkan kontroversi. Misalnya, Australia dianggap oleh beberapa negara Pasifik sebagai sekutu de facto Amerika Serikat (AS) dan menjadi sasaran kritik karena dianggap terlalu bergantung pada AS.

Namun, pengaruh Australia dalam dinamika politik kawasan Pasifik Selatan tidak selalu positif. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Australia dikritik oleh beberapa negara Pasifik karena menentang usulan resolusi tentang perubahan iklim yang lebih ambisius di Forum Kepulauan Pasifik. Hal ini memperburuk hubungan Australia dengan beberapa negara anggota forum dan memicu kekhawatiran akan dominasi Australia dalam kawasan.

Selain itu, Australia juga memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara di kawasan tersebut. Australia secara aktif mengejar kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan. Upaya Australia untuk mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut mencakup kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan dalam bidang keamanan, termasuk pelatihan pasukan dan patroli bersama.

Keamanan di kawasan Pasifik Selatan menjadi penting bagi Australia karena wilayah tersebut berdekatan dengan Australia dan memiliki potensi untuk menjadi sumber masalah keamanan seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan konflik regional. Australia memainkan peran penting dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Australia secara aktif berpartisipasi dalam operasi penegakan hukum internasional untuk melawan perdagangan narkoba di wilayah tersebut. Selain itu, Australia juga

menyediakan bantuan untuk membangun kemampuan keamanan nasional di negara-negara Pasifik Selatan.

Dalam sektor ekonomi, Australia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan di kawasan Pasifik Selatan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, Australia memiliki hubungan dagang yang erat dengan negara-negara di kawasan ini. Selain itu, Australia juga memberikan bantuan pembangunan yang signifikan kepada negara-negara Pasifik Selatan.

Salah satu upaya Australia dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik Selatan adalah melalui Pasifik Agreement on Closer Economic Relations (PACER). Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat perdagangan dan investasi antara Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik Selatan. Di samping itu, Australia juga memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara Pasifik Selatan.

Namun, meskipun Australia memiliki peran penting dalam dinamika politik, keamanan, dan ekonomi kawasan Pasifik Selatan, negara ini juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi Australia adalah munculnya kekuatan besar lainnya di kawasan ini, seperti China. Kehadiran China di kawasan Pasifik Selatan dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Australia di kawasan ini.

Selain itu, Australia juga dihadapkan dengan masalah kemanusiaan di kawasan Pasifik Selatan, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik sosial. Masalah-masalah ini membutuhkan perhatian dan tindakan yang serius dari Australia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya.

Pengaruh China di Pasifik Selatan

Australia sebagai negara yang terletak di kawasan ini memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan. Namun, kehadiran China yang semakin dominan di kawasan ini menunjukkan adanya ancaman bagi posisi Australia sebagai negara yang mendominasi kawasan.

Kebijakan luar negeri China dan Australia memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan dan prinsip. China memiliki kepentingan besar di Kawasan Pasifik Selatan, terutama dalam hal ekonomi dan politik. China memiliki visi untuk membangun kembali kekuatan dan pengaruhnya sebagai kekuatan besar dunia. Salah satu upayanya adalah dengan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Kawasan Pasifik Selatan. China melakukan hal ini dengan meluncurkan berbagai inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketergantungan negara-negara di kawasan terhadap China dan memperkuat pengaruh China di kawasan ini.

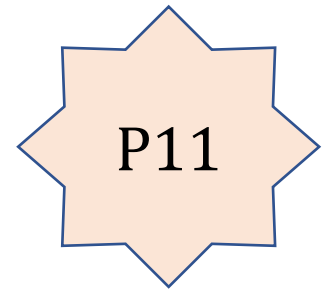
Di sisi lain, Australia memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dengan China. Australia memiliki kepentingan dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan. Australia juga memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, yang membuat Australia terlibat dalam upaya untuk mempertahankan keamanan kawasan Asia-Pasifik.

Melihat peran China dalam kawasan Pasifik Selatan yang semakin kuat, Australia seharusnya memperhatikan dampaknya terhadap kepentingannya di kawasan tersebut dan melakukan upaya untuk memperkuat posisinya di kawasan Pasifik Selatan. Australia harus menyadari bahwa peran China di kawasan Pasifik Selatan akan terus berkembang dan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap

kepentingan Australia di kawasan tersebut. Selanjutnya, silakan baca daftar materi berikut ini:

1. Medcalf, R. (2018). *Contest for the Indo-Pacific: Why China won't map the future*. Melbourne: La Trobe University Press.
2. Stoett, P. (2019). *The Global Environment: Institutions, Law, and Policy* (4th ed.). Washington, DC: CQ Press.
3. Thayer, C. A. (2019). China's rise and the future of Southeast Asia. *Journal of Contemporary Asia*, 49(1), 1-13.
4. Breslin, S., & Higgott, R. (2018). The Pacific challenge: China's rise and Australia's future. *Australian Journal of International Affairs*, 72(2), 91-102.
5. Shirk, S. L. (2018). *The China challenge: Shaping the choices of a rising power*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
6. Chen, G. (2019). China's Belt and Road Initiative in the South Pacific. *The Round Table*, 108(3), 293-304.
7. The Lowy Institute. (2019). *Australia and the Pacific*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/issues/australia-and-pacific>
8. ABC News. (2019, April 29). China is spending big in the Pacific to increase its influence. Here's why it's bad news for Australia. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2019-04-30/china-pacific-islands-investment/11052958>

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN FIJI DAN KEPULAUAN SOLOMON



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai informasi tentang model hubungan Australia dengan negara-negara Pasifik yang berpengaruh, hubungan di antara mereka serta permasalahan yang muncul: khususnya Fiji dan Kepulauan Solomon.

RELASI AUSTRALIA-FIJI

Australia sebagai negara yang memiliki wilayah terbesar keenam di dunia dan sebagai anggota utama dalam organisasi kawasan Pasifik Selatan, sangat berperan dalam stabilitas dan perkembangan kawasan tersebut. Salah satu negara yang memiliki hubungan khusus dengan Australia adalah Fiji, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan yang terletak di sebelah timur laut Australia. Hubungan bilateral antara Australia dan Fiji telah terjalin selama lebih dari satu abad dan telah melalui berbagai dinamika yang mengarah pada peningkatan kerja sama yang erat namun juga terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Artikel ini akan membahas dinamika hubungan Australia dengan Fiji di Kawasan Pasifik Selatan, meliputi sejarah hubungan bilateral, isu-isu utama yang mempengaruhi hubungan kedua negara, dan prospek kerja sama di masa depan.

Hubungan bilateral antara Australia dan Fiji dimulai sejak era kolonial Inggris di wilayah Pasifik Selatan. Inggris menduduki Fiji pada tahun 1874 dan menjadikannya sebagai koloni milik Inggris. Selama masa pemerintahan

Inggris, Australia menjadi mitra dagang penting bagi Fiji, dan banyak warga Australia yang bekerja di Fiji. Namun, setelah Fiji merdeka pada tahun 1970, hubungan antara kedua negara mengalami perubahan. Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Fiji dan hubungan diplomatik antara kedua negara segera terjalin. Kedua negara mulai membangun kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan bantuan pembangunan.

Selama bertahun-tahun, hubungan bilateral antara Australia dan Fiji berkembang secara positif. Australia menjadi mitra dagang utama bagi Fiji dan menyediakan bantuan pembangunan yang signifikan. Selain itu, banyak warga Fiji yang bekerja di Australia dan menjadikannya sebagai negara tujuan migrasi utama mereka. Namun, hubungan antara kedua negara juga mengalami tantangan, terutama selama krisis politik dan militer di Fiji pada tahun 1987 dan 2000. Australia mengambil sikap keras terhadap kudeta dan pengambilan alih kekuasaan oleh militer, yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara kedua negara terganggu. Hubungan antara kedua negara pulih setelah pemilihan umum yang diadakan di Fiji pada tahun 2014 dan Australia menghapus sanksi yang diberlakukan terhadap Fiji.

Salah satu isu utama dalam hubungan bilateral antara Australia dan Fiji adalah masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Fiji telah mengalami periode ketidakstabilan politik dan militer selama beberapa dekade, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penghapusan demokrasi. Australia telah mengecam tindakan tersebut dan berupaya mendorong Fiji untuk memulihkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, Australia juga memainkan peran penting dalam membantu pembangunan Fiji, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan ekonomi. Pada 2019, pemerintah Australia mengumumkan bantuan sebesar

AUD 84,4 juta untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah di Fiji. Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki akses ke sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Namun, hubungan Australia-Fiji juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu isu sensitif adalah masalah perbatasan maritim antara kedua negara. Terdapat perselisihan mengenai hak pengelolaan sumber daya laut di sekitar Pulau Cakaudrove, yang menjadi sumber konflik antara kedua negara. Namun, kedua negara berusaha untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan konsultasi.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Australia-Fiji sempat memburuk akibat sikap Australia yang dianggap terlalu campur tangan dalam urusan internal Fiji. Pada 2006, militer Fiji melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih, dan Australia menjadi salah satu negara yang mengecam tindakan tersebut dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Fiji. Namun, pada 2014, Australia mulai memulihkan hubungan dengan Fiji dengan mengakhiri sanksi dan memulai kerja sama ekonomi dan keamanan.

Dalam konteks Kawasan Pasifik Selatan, hubungan Australia dengan Fiji juga memainkan peran penting. Fiji merupakan negara yang cukup berpengaruh di kawasan ini, dan menjadi anggota aktif dalam beberapa organisasi regional seperti Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi Asia Pasifik. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan Fiji menjadi hal yang strategis bagi Australia dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

RELASI AUSTRALIA – SOLOMON ISLANDS

Australia dan Solomon Islands memiliki hubungan bilateral yang panjang. Australia adalah salah satu dari empat negara yang membentuk

"*The Pacific Islands Forum*" pada tahun 1971, bersama dengan Fiji, New Zealand, dan Tonga. Solomon Islands kemudian menjadi anggota forum pada tahun 1978. Selama tahun 1980-an, Australia dan Solomon Islands memiliki hubungan yang dekat karena kepentingan strategis dan ekonomi yang sama. Australia memberikan bantuan pembangunan kepada Solomon Islands dan mendukung upaya pemerintah Solomon Islands dalam memperbaiki infrastruktur dan pelayanan dasar. Hubungan ini menjadi tegang pada tahun 1998 ketika perdana menteri Solomon Islands, Bartholomew Ulufa'alu, mencari dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya untuk membentuk kelompok "*Melanesian Spearhead Group*" sebagai alternatif dari "*The Pacific Islands Forum*". Australia menolak ide tersebut karena menganggap hal tersebut dapat merusak stabilitas politik dan keamanan di kawasan.

Hubungan Australia-Solomon Islands tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2006, Solomon Islands mengekspulsi sejumlah diplomat Australia yang dituduh melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri Solomon Islands. Kejadian ini menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam hal kebijakan luar negeri.

Hubungan politik dan keamanan antara Australia dan Solomon Islands telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Australia terus memberikan bantuan keamanan dan militer kepada Solomon Islands, termasuk dalam mengatasi masalah keamanan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba. Australia juga memberikan bantuan untuk memperkuat kapasitas keamanan dan penegakan hukum di Solomon Islands.

Namun, ada beberapa isu politik yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Salah satu isu tersebut adalah masalah hak asasi manusia, yang menjadi perhatian utama Australia. Beberapa kasus pelanggaran hak

asasi manusia di Solomon Islands telah menimbulkan kekhawatiran bagi Australia dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara.

Hubungan ekonomi antara Australia dan Solomon Islands juga cukup penting. Australia adalah mitra dagang terbesar bagi Solomon Islands dan merupakan negara yang paling banyak berinvestasi di negara tersebut. Beberapa perusahaan Australia telah beroperasi di Solomon Islands dalam berbagai sektor, seperti pertambangan, perikanan, dan pariwisata.

Namun, hubungan ekonomi antara Australia dan Solomon Islands juga rentan terhadap perubahan kondisi global, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, terdapat beberapa isu yang mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara, seperti masalah perburuhan dan hak asasi manusia di sektor industri.

Setelah terjadinya konflik di Solomon Islands pada tahun 2000, pemerintah Australia memutuskan untuk terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Pada tahun 2003, Australia memimpin koalisi pasukan penjaga perdamaian yang dikenal sebagai Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI). Koalisi tersebut terdiri dari Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Tonga dan Samoa.

Tujuan dari misi ini adalah untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di Solomon Islands, serta membangun kembali institusi pemerintahan yang rusak akibat konflik. Selama hampir satu dekade, Australia menempatkan lebih dari 2.000 personel militernya di Solomon Islands, dan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur dan membantu pembangunan pemerintahan.

Meskipun RAMSI berhasil mengembalikan keamanan dan stabilitas di Solomon Islands, namun keterlibatan Australia dalam misi ini juga menuai kritik dari beberapa pihak. Beberapa kritikus menuduh Australia

menggunakan RAMSI sebagai alat untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan, dan memaksakan kehendaknya terhadap pemerintah Solomon Islands.

Tantangan dalam Hubungan Bilateral

Meskipun hubungan Australia dengan Solomon Islands terbilang cukup baik, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kerjasama bilateral di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya pengaruh negara-negara lain di kawasan Pasifik Selatan, khususnya China.

China telah meningkatkan kehadirannya di kawasan Pasifik Selatan dalam beberapa tahun terakhir dengan memberikan bantuan pembangunan dan investasi yang besar kepada negara-negara di kawasan tersebut. Hal ini mengkhawatirkan Australia, karena dianggap dapat mengancam posisinya sebagai negara pengaruh di kawasan Pasifik Selatan.

Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan migrasi manusia. Banyak warga Solomon Islands yang mencari kehidupan yang lebih baik di Australia, sehingga memicu ketegangan terkait dengan masalah migrasi di antara kedua negara.

Secara keseluruhan, hubungan antara Australia dan Solomon Islands dapat dikatakan sebagai hubungan yang relatif baik. Australia telah memberikan bantuan dan dukungan yang besar kepada Solomon Islands dalam berbagai bidang, dan telah terlibat secara aktif dalam upaya membangun kembali negara tersebut pasca konflik. Namun, terdapat pula tantangan dan hambatan dalam menjaga kerjasama bilateral di masa depan, seperti meningkatnya pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan dan masalah terkait migrasi manusia.

Solomon Islands memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih mengakui Tiongkok pada 16 September 2019, sehingga mengecewakan Australia dan AS yang merasa kehilangan sekutu strategis di kawasan Pasifik Selatan. Namun, sejak saat itu, Australia telah meningkatkan keterlibatannya di Solomon Islands melalui bantuan pembangunan dan kerja sama ekonomi. Pada akhirnya, Australia berharap bahwa upaya-upayanya ini akan membantu menjaga stabilitas dan memperkuat hubungan antara kedua negara di masa depan.

Di sisi lain, Solomon Islands juga merupakan bagian dari Kepulauan Solomon yang terletak di tengah-tengah Samudera Pasifik, di sebelah timur Papua Nugini. Kepulauan Solomon terdiri dari sekitar 900 pulau dan memiliki populasi sekitar 652.858 orang. Meskipun memiliki banyak potensi sumber daya alam, termasuk kayu, ikan, dan tambang, keadaan ekonomi di Solomon Islands masih lemah dan rentan terhadap gejolak politik dan sosial.

Dalam hal ini, Australia sebagai tetangga terdekat Solomon Islands dan negara besar di kawasan Pasifik Selatan, memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas di negara tersebut. Sejak tahun 2003, Australia telah mengirimkan lebih dari 2.000 personel militer dan sipil ke Solomon Islands melalui Operasi Helpem Fren (OHF) untuk membantu memulihkan ketertiban dan membangun kembali lembaga-lembaga pemerintahan setelah periode konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, Australia juga memberikan bantuan pembangunan kepada Solomon Islands melalui program-program seperti Solomon Islands Economic Reform Program (SIERP) dan Solomon Islands Basic Education Program (SIBEP) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan sistem pendidikan di negara tersebut. Di bidang ekonomi, Australia juga merupakan mitra dagang penting bagi Solomon Islands, dengan total nilai perdagangan bilateral mencapai AUD 203 juta pada tahun 2019.

Namun, hubungan antara Australia dan Solomon Islands tidak selalu mulus. Pada tahun 2019, ketegangan muncul ketika Solomon Islands membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Australia dan AS mengkhawatirkan pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan dan memandang bahwa tindakan Solomon Islands akan membuka jalan bagi penetrasi Tiongkok di negara-negara kecil di kawasan ini.

Selain itu, ada juga beberapa isu yang masih menjadi sumber ketegangan antara kedua negara, seperti kebijakan imigrasi dan perlakuan Australia terhadap warga Solomon Islands yang tinggal di Australia. Di sisi lain, beberapa pihak di Solomon Islands juga mengkritik bantuan pembangunan yang diberikan oleh Australia, karena dianggap tidak efektif dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut.

Australia juga telah memberikan bantuan keuangan sebesar AUD 250 juta untuk membangun kabel bawah laut yang menghubungkan Solomon Island dengan Papua Nugini dan Australia. Kabel ini akan meningkatkan akses ke internet di Solomon Island dan meningkatkan konektivitas mereka dengan negara-negara lain di kawasan.

Namun, terdapat pula perbedaan pandangan di antara Australia dan Solomon Island terkait dengan isu lingkungan dan sumber daya alam. Solomon Island menolak penawaran Australia untuk memperpanjang kontrak dengan perusahaan tambang Australia, Pacific Bauxite, di tengah kekhawatiran akan dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Dalam upaya memperkuat hubungan bilateral, Australia telah menandatangani kemitraan strategis dengan Solomon Island pada tahun 2016. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam bidang

keamanan, pemberantasan terorisme, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesehatan dan pendidikan.

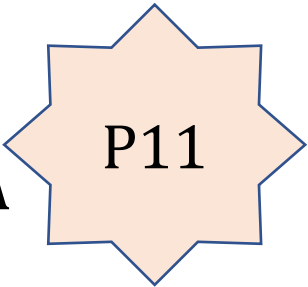
Pada tahun 2020, Australia juga memberikan bantuan keuangan sebesar AUD 4 juta untuk membantu Solomon Island mengatasi dampak pandemi COVID-19. Bantuan ini terutama difokuskan pada penguatan sistem kesehatan dan dukungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral antara Australia dan Solomon Island telah mengalami beberapa ketegangan terkait dengan isu lingkungan dan sumber daya alam. Namun, upaya Australia untuk membantu membangun infrastruktur dan meningkatkan konektivitas Solomon Island serta bantuan keuangan yang diberikan pada masa pandemi COVID-19, menunjukkan komitmen Australia untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

1. Australia Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). Solomon Islands country brief. <https://www.dfat.gov.au/geo/solomon-islands/Pages/solomon-islands-country-brief>
2. Australia Department of Foreign Affairs and Trade. (2020, June 17). COVID-19 support to Pacific and Timor-Leste. <https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/pacific-and-timor-leste-covid-19-support>
3. Australian Broadcasting Corporation. (2019, August 1). Solomon Islands government denies being pressured by Australia to drop Chinese tech contract. <https://www.abc.net.au/news/2019-08-01/solomon-islands-government-denies-australian-pressure-over-huawei/11376116>
4. Pacific Islands Forum Secretariat. (2018). Solomon Islands country profile. <https://www.forumsec.org/solomon-islands/>

5. "Australia-Fiji relations" (Australian Department of Foreign Affairs and Trade) - <https://www.dfat.gov.au/geo/fiji/Pages/fiji-country-brief>
6. "Australia's relations with Fiji: 1970 to the present" (Australian Institute of International Affairs) - <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australias-relations-with-fiji-1970-to-the-present/>
7. "Australia-Fiji relations: evolution, issues, and prospects" (Australian National University) - <https://www.policyforum.net/australia-fiji-relations-evolution-issues-and-prospects/>
8. "A friendship interrupted: Australia-Fiji relations since 2006" (Lowy Institute) - <https://www.lowyinstitute.org/publications/friendship-interrupted-australia-fiji-relations-2006>
9. "Fiji and Australia's Pacific policy" (East Asia Forum) - <https://www.eastasiaforum.org/2019/03/12/fiji-and-australias-pacific-policy/>
10. "Australia, Fiji and the Pacific islands: new diplomacy or new imperialism?" (The Conversation) - <https://theconversation.com/australia-fiji-and-the-pacific-islands-new-diplomacy-or-new-imperialism-93895>
11. "The Pacific Pivot: Australia's new focus on the Pacific" (Australian Strategic Policy Institute) - <https://www.aspi.org.au/report/pacific-pivot-australias-new-focus-pacific>

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN NEW ZEALAND, PAPUA NEW GUINIEA TONGA & VANUATU



P11

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai informasi tentang model hubungan Australia dengan negara-negara Pasifik yang berpengaruh, hubungan di antara mereka serta permasalahan yang muncul: khususnya Papua New Guinea, New Zealand, Tonga, dan Vanuatu.

RELASI AUSTRALIA – NEW ZEALAND

Australia dan New Zealand adalah dua negara tetangga yang terletak di kawasan Pasifik Selatan. Kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat erat, baik dalam hal politik, keamanan, ekonomi, maupun budaya. Kedua negara ini juga memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dalam hubungan bilateral mereka, termasuk sejumlah perselisihan dan ketegangan.

Sejarah hubungan Australia dengan New Zealand dimulai pada abad ke-19, ketika Australia dan New Zealand masih menjadi koloni Inggris. Kedua negara ini menjadi anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa setelah merdeka dari Inggris pada pertengahan abad ke-20. Hubungan Australia dan New Zealand semakin erat setelah keduanya menjadi anggota Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.

Dalam beberapa dekade terakhir, Australia dan New Zealand telah memperkuat hubungan bilateral mereka melalui sejumlah kerja sama, seperti kerja sama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pariwisata. Kedua negara ini juga seringkali berkolaborasi dalam berbagai forum internasional dan regional, seperti Forum Kepulauan Pasifik, APEC, dan ASEAN Regional Forum.

Hubungan Australia dengan New Zealand telah mengalami sejumlah perubahan selama beberapa dekade terakhir. Meskipun kedua negara ini masih memiliki hubungan yang erat, namun sejumlah faktor telah mempengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan Australia dengan New Zealand adalah sejarah hubungan kedua negara tersebut. Meskipun kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang dalam kerja sama, namun sejumlah perselisihan dan ketegangan juga terjadi dalam hubungan bilateral mereka. Sebagai contoh, perselisihan antara Australia dan New Zealand dalam mengklaim wilayah perikanan di Samudera Selatan pernah terjadi pada tahun 1970-an. Namun, kedua negara ini berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut melalui kesepakatan yang disebut sebagai Kesepakatan Zona Bebas Senjata di Samudera Selatan.

Faktor keamanan juga mempengaruhi dinamika hubungan Australia dengan New Zealand. Kedua negara ini telah bekerja sama dalam bidang keamanan untuk melawan ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas. Kedua negara ini juga telah menandatangani sejumlah perjanjian keamanan, seperti Perjanjian Lima Negara (Five Eyes) yang melibatkan Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru. Perjanjian ini merupakan sebuah kerja sama intelijen untuk memerangi terorisme, kejahatan siber, dan ancaman keamanan lainnya.

Terkait dengan hubungan ekonomi, Australia dan New Zealand memiliki perjanjian perdagangan bebas yang dikenal sebagai Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) sejak tahun 1983. Perjanjian tersebut telah memungkinkan kedua negara untuk memiliki akses pasar yang lebih besar, meningkatkan investasi, dan memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang. Selain itu, kedua negara juga saling bergantung dalam hal sumber daya alam dan energi, dengan Australia menjadi salah satu mitra utama dalam pasokan energi dan sumber daya alam bagi New Zealand.

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Australia dan New Zealand juga memiliki hubungan yang erat dalam hal keamanan. Kedua negara adalah mitra dalam keamanan regional melalui berbagai kerja sama di bidang pertahanan dan intelijen, seperti Five Eyes Intelligence Alliance. Selain itu, keduanya juga berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB di berbagai negara seperti Timor Leste, Bougainville, dan Kepulauan Solomon.

Namun, meskipun hubungan kedua negara terbilang harmonis dan erat, namun terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah isu migrasi. Sejak 2001, Australia telah menetapkan kebijakan ketat terhadap imigran ilegal dan New Zealand menjadi tujuan migrasi ilegal yang sering dilalui oleh para imigran tersebut. Hal ini menyebabkan kekhawatiran Australia terhadap potensi pengaruh New Zealand dalam masalah migrasi ilegal di wilayah Australia.

Selain itu, dalam hal politik, terdapat perbedaan pandangan antara kedua negara terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. New Zealand seringkali dianggap lebih proaktif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, sementara Australia dianggap kurang ambisius dalam hal ini. Hal ini menjadi masalah ketika kedua negara harus berdiskusi dalam kerangka kerja organisasi internasional seperti PBB atau APEC.

Secara keseluruhan, hubungan Australia dengan New Zealand dalam Kawasan Pasifik Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun perdamaian dan keamanan di wilayah Pasifik dan menjaga stabilitas regional. Sebagai negara-negara yang saling terkait secara historis, politik, dan ekonomi, hubungan antara Australia dan Selandia Baru terus berkembang dan memperkuat kemitraan mereka dalam berbagai bidang. Kedua negara ini memiliki beberapa kepentingan strategis bersama, seperti kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan lingkungan.

Pentingnya hubungan Australia dengan Selandia Baru juga terlihat dalam kerja sama bilateral dalam berbagai organisasi multilateral, seperti ASEAN Regional Forum, APEC, dan Forum Kepulauan Pasifik. Australia dan Selandia Baru memiliki visi dan tujuan yang sama dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan.

Australia dan Selandia Baru juga menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2008, yang memberikan dasar hukum bagi kerja sama pertahanan yang lebih erat antara kedua negara. Persetujuan ini mencakup kerja sama dalam bidang pelatihan, peningkatan kemampuan, dan pertukaran intelijen.

Namun, hubungan Australia-Selandia Baru tidak selalu tanpa hambatan. Ada beberapa isu sensitif dalam hubungan bilateral mereka, seperti masalah imigrasi dan status warga Selandia Baru di Australia. Ada juga perbedaan pandangan mengenai perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan, seperti dalam kasus Fiji.

Meskipun demikian, hubungan antara Australia dan Selandia Baru tetap menjadi salah satu yang penting di kawasan Pasifik Selatan. Kedua negara terus bekerja sama untuk memperkuat kemitraan mereka dan mencapai tujuan bersama. Dalam beberapa dekade ke depan, penting bagi Australia dan Selandia Baru untuk mempertahankan hubungan yang kuat

dan saling menguntungkan untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan Pasifik Selatan.

RELASI AUSTRALIA PAPUA NEW GUINEA

Papua New Guinea (PNG) adalah negara yang terletak di Kepulauan Pasifik Selatan, bersebelahan dengan Indonesia dan Australia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah Pasifik Selatan, PNG memiliki potensi ekonomi yang besar namun juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan dan stabilitas politiknya. Hubungan antara Australia dan Papua New Guinea sangat penting, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas wilayah Pasifik Selatan.

Hubungan antara Australia dan Papua New Guinea telah terjalin sejak awal penjajahan kolonial Inggris di wilayah tersebut. Saat itu, wilayah Papua bagian selatan menjadi bagian dari koloni Australia, sedangkan bagian utara Papua New Guinea menjadi protektorat Inggris. Setelah Perang Dunia II, wilayah Papua bagian selatan menjadi wilayah pengelolaan PBB, yang kemudian dikelola oleh Australia sebagai mandat PBB hingga 1975.

Setelah Papua New Guinea merdeka pada tahun 1975, hubungan antara Australia dan Papua New Guinea terus berkembang. Australia menjadi salah satu mitra dagang terbesar Papua New Guinea dan memberikan bantuan pembangunan serta dukungan keamanan bagi negara tetangganya tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus dan beberapa kali mengalami ketegangan.

Tantangan terbesar dalam hubungan antara Australia dan Papua New Guinea adalah masalah imigrasi. Sejak merdeka, Papua New Guinea menjadi tujuan migrasi bagi warga Australia yang mencari pekerjaan dan peluang bisnis di negara tetangga. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan

masyarakat Papua New Guinea karena warga asing dianggap mengambil pekerjaan dan sumber daya negara. Tantangan lainnya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam dan isu perbatasan antara kedua negara.

Selain itu, hubungan antara Australia dan Papua New Guinea sempat memburuk pada tahun 2013 ketika Papua New Guinea mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan perjanjian kerja sama dengan Australia dalam penanganan masalah pengungsi. Perjanjian tersebut menempatkan pengungsi di Papua New Guinea yang mencoba masuk ke Australia di kamp penampungan yang dioperasikan oleh pemerintah Australia. Namun, keputusan Papua New Guinea untuk menghentikan perjanjian tersebut menimbulkan ketegangan antara kedua negara.

Namun, hubungan Australia dan Papua New Guinea tetap kuat dan terus berkembang. Australia telah memberikan bantuan besar dalam pembangunan Papua New Guinea, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan. Australia juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Pasifik Selatan, termasuk Papua New Guinea.

Selain itu, Australia juga memberikan bantuan dalam pengembangan infrastruktur di Papua New Guinea, seperti pembangunan jalan raya dan jembatan, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Australia juga berkontribusi dalam program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pejabat pemerintahan Papua New Guinea melalui *Australian Pacific Training Coalition*.

Namun, hubungan antara Australia dan Papua New Guinea juga mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan pandangan dalam hal keamanan dan pertahanan. Papua New Guinea memiliki ketergantungan yang tinggi pada bantuan keamanan dari negara-negara lain, termasuk Australia. Namun, pandangan Papua New Guinea yang

lebih independen dalam hal pertahanan dan keamanan sering kali bertentangan dengan kepentingan strategis Australia.

Selain itu, beberapa isu lingkungan juga menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral antara Australia dan Papua New Guinea, seperti kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pertanian skala besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing.

Namun, secara keseluruhan, hubungan antara Australia dan Papua New Guinea terus mengalami perkembangan yang positif. Kedua negara saling mengakui pentingnya menjaga hubungan yang erat, terutama dalam hal perdagangan dan investasi, keamanan, dan kerja sama pembangunan.

RELASI AUSTRALIA - VANUATU

Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik Selatan. Terdiri dari 83 pulau vulkanik dan korallik yang tersebar di sekitar 1.300 kilometer persegi, Vanuatu memiliki populasi sekitar 280.000 jiwa. Negara ini merdeka dari Inggris dan Prancis pada tahun 1980, dan sejak itu, Vanuatu telah menjalin hubungan dengan negara-negara tetangganya, termasuk Australia. Hubungan Australia dengan Vanuatu telah ada selama lebih dari 40 tahun, dan kedua negara memiliki hubungan yang cukup kuat dalam hal perdagangan, pembangunan, dan bantuan.

Hubungan Australia dengan Vanuatu bermula pada tahun 1906, ketika Australia menerima mandat Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah New Hebrides, yang saat itu merupakan sebuah kondominium antara Inggris dan Prancis. Australia memegang peranan yang penting dalam mengatur New Hebrides dan memberikan bantuan ekonomi kepada wilayah tersebut.

Sebagai negara tetangga, Australia memiliki kepentingan strategis di kawasan Pasifik Selatan yang mencakup negara-negara kepulauan seperti

Vanuatu. Hubungan Australia dengan Vanuatu telah berlangsung sejak era kolonial, di mana Australia menjadi pengelola sebagian wilayah Vanuatu. Namun, setelah kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980, hubungan antara kedua negara mengalami perubahan.

Pada awal kemerdekaannya, Vanuatu memiliki kecenderungan untuk mendekati ke negara-negara sosialis dan mengambil jarak dari negara-negara Barat, termasuk Australia. Namun, setelah perubahan pemerintahan pada tahun 1990-an, Vanuatu mulai membuka diri ke arah negara-negara Barat dan meningkatkan kerja sama dengan Australia.

Pada tahun 2006, Australia menandatangani perjanjian kemitraan dengan Vanuatu, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang seperti keamanan, pertahanan, dan ekonomi. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara terus membaik dan kerja sama yang lebih erat terus dibangun.

Setelah Vanuatu merdeka pada tahun 1980, hubungan antara Australia dan Vanuatu berkembang pesat. Australia menjadi salah satu donor utama bagi Vanuatu, memberikan bantuan keuangan dan teknis dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Kerjasama antara Australia dan Vanuatu di bidang keamanan sangat penting. Australia membantu melatih pasukan keamanan Vanuatu dalam menghadapi ancaman yang muncul di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, kedua negara juga menjalin kerjasama dalam melawan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan lintas negara lainnya. Di bidang keamanan dan pertahanan, Australia telah memberikan dukungan kepada Vanuatu melalui pelatihan militer dan bantuan keamanan. Australia juga memiliki program bantuan pengembangan yang membantu Vanuatu meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan keamanan maritimnya.

Australia juga telah membantu Vanuatu dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan siklon tropis. Pada tahun 2015, Australia memberikan bantuan sebesar AUD 5,5 juta untuk membantu Vanuatu mengatasi dampak siklon Pam yang melanda negara tersebut.

Australia dan Vanuatu memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Australia adalah mitra dagang terbesar kedua Vanuatu setelah Jepang. Vanuatu mengimpor sebagian besar barang dari Australia, sementara Australia mengimpor beberapa produk pertanian dari Vanuatu seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit.

Australia juga merupakan investor utama di Vanuatu, dengan investasi terbesar berasal dari sektor pariwisata. Banyak wisatawan Australia yang berkunjung ke Vanuatu setiap tahunnya, dan sektor pariwisata memberikan kontribusi penting bagi ekonomi Vanuatu.

Australia telah memberikan bantuan pembangunan yang signifikan kepada Vanuatu dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu donor utama bagi Vanuatu, Australia telah berkontribusi dalam pembangunan jalan dan infrastruktur publik lainnya. Vanuatu tergantung pada bantuan luar negeri untuk membiayai sebagian besar pengeluarannya, termasuk infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Australia adalah salah satu penyumbang utama bantuan luar negeri Vanuatu, yang berkontribusi terhadap hubungan yang lebih dekat antara kedua negara.

Terdapat beberapa bentuk kerja sama ekonomi antara Australia dan Vanuatu. Di bidang perdagangan, Australia adalah mitra dagang terbesar kedua Vanuatu setelah China. Produk utama yang diekspor dari Vanuatu ke Australia meliputi minyak kelapa, kopi, kakao, dan kava. Sementara itu, Australia mengimpor bahan bakar fosil, bahan kimia, dan produk-produk pertanian dari Vanuatu.

Selain perdagangan, Australia juga memberikan bantuan pembangunan dan investasi di Vanuatu. Bantuan pembangunan Australia meliputi dukungan untuk infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, dan program-program bantuan sosial. Sementara itu, investasi Australia di Vanuatu terkonsentrasi di sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan sektor keuangan.

Namun, meskipun Australia dan Vanuatu memiliki hubungan yang relatif baik, terdapat beberapa isu sensitif yang perlu diatasi. Salah satunya adalah isu kepulauan Torres Strait yang terletak di perbatasan antara Australia dan Papua Nugini. Vanuatu adalah salah satu negara yang telah menyorotkan keprihatinannya terhadap kondisi di kepulauan tersebut, terutama terkait dengan masalah lingkungan dan hak asasi manusia.

Selain itu, isu yang terkait dengan perubahan iklim juga menjadi isu sensitif dalam hubungan Australia-Vanuatu. Vanuatu merupakan salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Australia telah memberikan dukungan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Vanuatu, namun ada harapan agar Australia dapat memberikan dukungan yang lebih besar lagi dalam upaya tersebut.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, Australia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Vanuatu. Kedua negara telah melakukan kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, dan sumber daya alam. Australia juga memberikan bantuan pembangunan untuk membantu Vanuatu meningkatkan ekonominya.

Namun, meskipun hubungan antara kedua negara terus membaik, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah isu perbatasan laut antara Australia dan Vanuatu, di mana

kedua negara belum sepenuhnya mencapai kesepakatan mengenai batas-batas wilayah maritim mereka.

Selain itu, Vanuatu juga masih bergantung pada bantuan pembangunan dari Australia dan negara-negara lain. Oleh karena itu, Vanuatu perlu meningkatkan kemampuannya ekonominya dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam konteks tersebut, Australia dapat berperan sebagai mitra yang membantu Vanuatu mencapai tujuan tersebut. Australia dapat terus memberikan bantuan pembangunan dan membantu Vanuatu meningkatkan kemampuannya ekonominya. Australia juga dapat membantu Vanuatu dalam mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah maritim mereka melalui negosiasi yang bersahabat.

Secara keseluruhan, hubungan Australia dengan Vanuatu terus membaik dan kerja sama yang lebih erat terus dibangun di berbagai bidang. Australia dapat berperan sebagai mitra yang membantu Vanuatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencap

Meskipun hubungan bilateral Australia-Vanuatu telah mengalami beberapa pergeseran dan konflik, namun keduanya tetap menjaga kerjasama dalam berbagai bidang. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Australia untuk memperkuat hubungan bilateral tersebut di masa depan, antara lain:
Meningkatkan bantuan pembangunan

Sebagai negara maju, Australia memiliki peran penting dalam membantu negara-negara berkembang seperti Vanuatu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Australia dapat memperkuat hubungan bilateral dengan Vanuatu dengan meningkatkan bantuan pembangunan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Kerjasama ekonomi yang kuat juga dapat menjadi fondasi penting bagi hubungan bilateral yang kokoh antara Australia dan Vanuatu. Dalam hal ini, Australia dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pengusaha Vanuatu untuk memperoleh peluang bisnis di Australia. Sebagai contoh, Australia dapat membuka akses ke pasar Australia bagi produk-produk Vanuatu seperti kopi, coklat, dan hasil pertanian lainnya.

Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan. Australia dan Vanuatu dapat memperkuat kerjasama mereka dalam hal keamanan dan pertahanan, seperti kerjasama antar militer dan peningkatan kapasitas keamanan di Vanuatu.

Masalah lingkungan juga menjadi isu penting yang perlu ditangani oleh kedua negara di kawasan Pasifik Selatan. Australia dan Vanuatu dapat memperkuat kerjasama mereka dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti penanganan sampah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan hubungan bilateral Australia-Vanuatu dapat semakin membaik dan semakin kokoh di masa depan. Dalam hal ini, Australia dapat memainkan peran penting sebagai negara maju yang memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam kesimpulannya, hubungan Australia dengan Vanuatu di kawasan Pasifik Selatan memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti faktor politik, keamanan, dan ekonomi. Meskipun terdapat beberapa isu sensitif yang perlu diatasi, hubungan kedua negara terus berkembang melalui kerja sama di berbagai bidang. Kedua negara harus terus memperkuat kerja sama dan dialog untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan.

RELASI AUSTRALIA – TONGA

Hubungan bilateral antara Australia dan Tonga telah terjalin selama lebih dari 100 tahun. Dalam sejarahnya, Australia telah memberikan dukungan yang signifikan bagi Tonga dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta membantu Tonga memperkuat kapasitas keamanan dan pertahanannya. Meski begitu, hubungan ini juga mengalami tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan isu migrasi dan perlakuan terhadap diaspora Tonga di Australia. Artikel ini akan membahas dinamika hubungan antara Australia dan Tonga, serta tantangan dan peluang yang dihadapi kedua negara.

Hubungan antara Australia dan Tonga dimulai pada awal abad ke-20, ketika Tonga menjadi salah satu dari sedikit negara di Pasifik Selatan yang tidak dikuasai oleh kekuatan kolonial. Pada tahun 1900, Tonga menandatangani perjanjian persahabatan dengan Australia, yang menjadi dasar dari hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara. Hubungan ini semakin diperkuat selama Perang Dunia II, ketika Australia dan Amerika Serikat membantu melindungi Tonga dari serangan Jepang.

Setelah kemerdekaannya pada tahun 1970, Tonga menjadi salah satu negara terkecil di dunia yang memiliki perwakilan diplomatik di Australia. Sejak saat itu, hubungan bilateral antara kedua negara semakin berkembang, terutama dalam bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Australia telah memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi Tonga dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta membantu Tonga mengembangkan sektor pariwisata yang penting bagi ekonomi negara tersebut.

Selain itu, Australia juga memberikan dukungan keamanan dan pertahanan bagi Tonga, dengan melatih personel keamanan Tonga dan

memberikan bantuan teknis dalam mengembangkan kapasitas pertahanan negara. Pada tahun 2006, ketika kerusuhan terjadi di Tonga dan mengancam stabilitas politik negara, Australia dan Selandia Baru bersama-sama membantu Tonga dalam memulihkan ketertiban dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.

Meski hubungan bilateral antara Australia dan Tonga terus berkembang sejak awal abad ke-20, hubungan ini juga mengalami tantangan dan kontroversi. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian kedua negara adalah masalah migrasi. Sejak tahun 1950-an, warga Tonga telah menjadi salah satu kelompok migran terbesar yang datang ke Australia. Namun, pada tahun 2014, pemerintah Australia mengumumkan bahwa warga Tonga tidak lagi diberikan akses bebas untuk bekerja di Australia, menyusul peningkatan jumlah migran Tonga yang datang ke Australia secara ilegal.

Tonga juga merupakan anggota *Pacific Islands Forum*, dan dalam forum ini, Tonga dan Australia telah bekerja sama dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Australia memberikan AUD 1 juta dalam bantuan kepada Pacific Islands Forum untuk memperkuat kapasitas negara-negara Pasifik dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, termasuk terorisme dan ekstremisme.

Selain itu, kerja sama dalam bidang pembangunan juga menjadi fokus penting dalam hubungan bilateral antara Australia dan Tonga. Australia telah menjadi salah satu donor utama bagi Tonga dalam hal bantuan pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pada tahun 2019, Australia memberikan AUD 11 juta dalam bantuan pembangunan ke Tonga untuk mendukung pembangunan jalan raya dan proyek air minum bersih.

Namun, hubungan antara Australia dan Tonga juga diwarnai dengan beberapa ketegangan, terutama dalam hal migrasi. Banyak warga Tonga yang bermigrasi ke Australia setiap tahunnya, baik secara legal maupun ilegal. Pada tahun 2018, Australia mengumumkan bahwa mereka akan menutup program visa kerja sementara bagi pekerja Pasifik, termasuk Tonga, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja asal Australia.

Di sisi lain, Tonga juga telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dengan pengaruh asing di kawasan Pasifik Selatan, terutama dari negara-negara seperti China. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Tonga mengungkapkan keprihatinannya bahwa Tonga dapat menjadi salah satu negara yang terjebak dalam jebakan utang yang diberikan oleh China, yang dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional mereka.

Secara keseluruhan, dinamika hubungan Australia-Tonga adalah kombinasi dari kerja sama yang erat dalam berbagai bidang, terutama dalam hal keamanan dan pembangunan, namun juga diwarnai dengan beberapa ketegangan, terutama terkait dengan migrasi dan pengaruh asing di kawasan. Upaya untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif antara kedua negara akan terus menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam waktu dekat. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan baca materi berikut ini:

1. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2019). Vanuatu Country Brief.
<https://www.dfat.gov.au/geo/vanuatu/vanuatu-country-brief>
2. Australian High Commission in Vanuatu. (n.d.). Australia-Vanuatu Bilateral Relationship.

https://vanuatu.highcommission.gov.au/pvla/Bilateral_Relationship.html

3. The Interpreter. (2019). Strengthening Australia's ties with Vanuatu. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/strengthening-australia-s-ties-vanuatu>
4. "About Vanuatu." Department of Foreign Affairs and Trade, 12 Aug. 2020, dfat.gov.au/geo/vanuatu/Pages/vanuatu-country-brief.aspx.
5. "Australia-Vanuatu Bilateral Relationship." Department of Foreign Affairs and Trade, 12 Nov. 2020, dfat.gov.au/geo/vanuatu/Pages/australia-vanuatu-bilateral-relationship.aspx.
6. "Australia and Vanuatu Agree to Enhance Economic Partnership." Department of Foreign Affairs and Trade, 21 Aug. 2019, dfat.gov.au/news/media-releases/Pages/australia-and-vanuatu-agree-to-enhance-economic-partnership.aspx.
7. "Australia and Vanuatu Sign Partnership Arrangement." Department of Foreign Affairs and Trade, 27 Nov. 2018, dfat.gov.au/news/media-releases/Pages/australia-and-vanuatu-sign-partnership-arrangement.aspx.
8. Borthwick, S., & Ritchie, S. (2013). Australia's Relations with Vanuatu. In J. Maclaren & B. Noonan (Eds.), *The Third Indochina War: Conflict between China, Vietnam and Cambodia, 1972-79* (pp. 228-244). Routledge.
9. Colmar Brunton. (2018). Vanuatu National Sustainable Development Plan: Baseline Study Report. Retrieved from <https://www.colmarbrunton.com/wp-content/uploads/2018/11/Vanuatu-National-Sustainable->

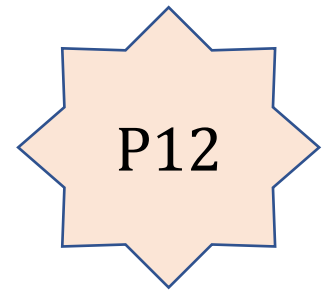
Development-Plan-Baseline-Study-Report-Colmar-Brunton-Sept-2018.pdf

10. Lal, B. V. (2004). *Australia and the Pacific Islands: challenges of identity and dependence*. Asia Pacific Press.
11. Patman, R. G. (2007). *New Zealand and the Pacific Islands*. In A. Bukh & C. Rasmussen (Eds.), *Small States and International Security: Europe and Beyond* (pp. 101-120). Routledge.
12. "Vanuatu: Economy." *The Commonwealth*, 2020, thecommonwealth.org/our-member-countries/vanuatu/economy.
13. Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). *Australia-Papua New Guinea relationship*. <https://www.dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/pages/australia-papua-new-guinea-relationship>
14. Australian Government. (2018). *Papua New Guinea country brief*. <https://www.dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/pages/papua-new-guinea-country-brief>
15. Rudd, K. (2018). *How Australia and Papua New Guinea can build a stronger, fairer relationship*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/how-australia-and-papua-new-guinea-can-build-a-stronger-fairer-relationship>
16. Conley Tyler, M. (2017). *Understanding the Australia-Papua New Guinea relationship*. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2017/06/understanding-the-australia-papua-new-guinea-relationship/>
17. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2021). *Australia-New Zealand relations*. Retrieved from

<https://www.dfat.gov.au/geo/new-zealand/Pages/australia-new-zealand-relations>

18. Australian Government Department of Defence. (2008). Australia-New Zealand Closer Defence Relations. Retrieved from https://www.defence.gov.au/ADC/Publications/ADC_Occasional_Papers/op19.pdf
19. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2021). Australia-New Zealand relationship. Retrieved from <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/australia/australia-new-zealand-relationship/>
20. Australian Strategic Policy Institute. (2018). The Australia-New Zealand defence relationship. Retrieved from <https://www.aspi.org.au/report/australia-new-zealand-defence-relationship>
21. Australia Department of Foreign Affairs and Trade. (2020). Tonga country brief. Diakses pada 10 Maret 2023 dari <https://www.dfat.gov.au/geo/tonga/Pages/tonga-country-brief>.
22. Australian Broadcasting Corporation. (2018, 20 Maret). Pacific labour mobility scheme to end, despite calls for expansion. Diakses pada 10 Maret 2023 dari <https://www.abc.net.au/news/2018-03-20/pacific-labour-mobility-scheme-ends-despite-calls-for-expansion/9560658>.
23. The Guardian. (2018, 13 Juli). Pacific nations at risk of being caught in 'debt trap' by China, warns Tonga PM. Diakses pada 10 Maret 2023 dari <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/13/pacific-nations-at-risk-of-being-caught>

PACIFIC ISLAND FORUM & SOUTHWEST PACIFIC FORUM



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan pola interaksi negara-negara Pasifik dan *Great Powers*, regionalisme di Pasifik. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami lebih lanjut tentang sejarah dan keterlibatan negara-negara Pasifik dalam regionalisme di kawasan.

REGIONALISME DI PASIFIK SELATAN

Pasifik Selatan adalah sebuah wilayah yang terletak di sekitar Kepulauan Pasifik, yang terdiri dari negara-negara yang beragam seperti Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara kecil seperti Fiji, Tonga, dan Vanuatu. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan rumit, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kolonialisme, kepentingan ekonomi, dan geopolitik. Salah satu aspek yang signifikan dari sejarah Pasifik Selatan adalah regionalisme, yaitu upaya untuk mengembangkan kerjasama dan integrasi ekonomi dan politik antara negara-negara di kawasan tersebut. Artikel ini akan membahas sejarah regionalisme di Pasifik Selatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana hal itu berdampak pada dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut.

Regionalisme di Pasifik Selatan memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan upaya untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II. Australia dan Selandia Baru berperan aktif

dalam pembentukan PBB, dan keduanya menjadi anggota pendiri organisasi tersebut pada tahun 1945. Namun, pada saat itu, kawasan Pasifik Selatan belum terorganisir secara regional, dan negara-negara di kawasan tersebut lebih fokus pada hubungan bilateral dengan negara-negara lain.

Baru pada tahun 1971, negara-negara di Pasifik Selatan membentuk Forum Kepulauan Pasifik, sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Forum ini terdiri dari 18 negara anggota, termasuk Australia dan Selandia Baru, serta negara-negara kecil seperti Kiribati dan Nauru. Forum ini awalnya bertujuan untuk membahas masalah ekonomi dan sosial, namun dengan berjalannya waktu, topik-topik seperti keamanan dan politik juga dibahas dalam forum ini.

Selain Forum Kepulauan Pasifik, terdapat pula organisasi lain di Pasifik Selatan seperti Komisi Pasifik Selatan (SPC) dan Sekretariat Pasifik (SP), yang keduanya didirikan pada tahun 1947. SPC bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengembangan ekonomi dan sumber daya alam, sementara SP fokus pada isu-isu politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Selama beberapa dekade berikutnya, Pasifik Selatan mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dekolonisasi dan perkembangan ekonomi. Beberapa negara di kawasan ini mencapai kemerdekaan mereka pada tahun 1960-an dan 1970-an, sementara yang lain masih berada di bawah kekuasaan kolonial.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya regionalisme di Pasifik Selatan. Pertama, adalah faktor geografis. Kawasan Pasifik Selatan merupakan kumpulan dari banyak negara kepulauan yang tersebar di seluruh Pasifik. Keadaan ini membuat negara-negara tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan dan pertukaran barang

dan jasa, yang menjadi faktor pendorong utama munculnya kerja sama regional.

Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting dalam munculnya regionalisme di Pasifik Selatan. Banyak negara di kawasan tersebut merupakan negara yang baru merdeka, dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kerja sama regional memungkinkan negara-negara tersebut untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama, termasuk dalam hal politik dan keamanan.

Peran Australia dalam sejarah regionalisme di Pasifik Selatan sangat penting. Australia merupakan negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut, terutama dalam hal keamanan dan perdagangan. Sejak awal pembentukan kerja sama regional di Pasifik Selatan, Australia telah terlibat aktif dalam proses tersebut. Pada tahun 1971, Australia bergabung dengan Forum Kepulauan Pasifik sebagai anggota pendiri, yang kemudian berkembang menjadi Forum Kepulauan Pasifik Selatan.

Di awal pembentukan, tujuan utama kerja sama regional di Pasifik Selatan adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara anggota. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tujuan dan cakupan kerja sama regional di kawasan tersebut semakin berkembang. Saat ini, kerja sama regional di Pasifik Selatan meliputi berbagai bidang, seperti keamanan, lingkungan, kesehatan, dan kebudayaan.

Salah satu contoh kerja sama regional yang signifikan di Pasifik Selatan adalah *Pacific Islands Forum* (PIF). PIF adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1971 oleh 16 negara anggota, termasuk Australia dan Selandia Baru. Tujuan utama PIF adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan di kawasan

Pasifik Selatan. Selain itu, PIF juga berfokus pada isu-isu lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia.

Namun, tidak semua negara di kawasan Pasifik Selatan sepakat dengan peran Australia dalam kerja sama regional. Beberapa negara mengkritik Australia karena dianggap memaksakan kepentingannya sendiri dan menempatkan dirinya sebagai pemimpin regional yang dominan. Selain itu, beberapa negara juga merasa bahwa Australia kurang memperhatikan isu-isu penting di kawasan tersebut, seperti isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, peran Australia dalam kerja sama regional di Pasifik Selatan tetap penting dan tidak dapat diabaikan. Australia memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat membantu negara-negara di kawasan tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, regionalisme di Pasifik Selatan telah berjalan sejak berabad-abad yang lalu dan mengalami banyak perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dinamika regionalisme, seperti politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Namun, upaya regionalisme ini terus berlanjut dan menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di Pasifik Selatan.

SEJARAH PACIFIC ISLAND FORUM & SOUTHWEST PACIFIC FORUM

Pasifik Selatan adalah wilayah yang terdiri dari sejumlah negara kecil dan pulau-pulau terpencil yang tersebar di sekitar Samudera Pasifik. Selama berabad-abad, wilayah ini telah menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Pada abad ke-20, wilayah ini menjadi tempat bertumbuhnya gerakan kemerdekaan nasional, perubahan politik dan ekonomi, dan akhirnya mencapai otonomi politik. Oleh karena itu, sejak akhir Perang Dunia II, banyak negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang

berupaya memperkuat kerjasama regional untuk mengatasi tantangan bersama.

Pacific Islands Forum (PIF) dan *South Pacific Forum (SPF)* adalah dua organisasi regional utama yang didirikan untuk mengatasi isu-isu yang mempengaruhi Pasifik Selatan. Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah Pasifik Selatan dan mempromosikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di antara negara-negara anggota.

Pacific Islands Forum (PIF) didirikan pada tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). SPF awalnya beranggotakan tujuh negara yang terdiri dari Australia, Fiji, New Zealand, Tonga, Samoa, Cook Islands dan Niue. SPF didirikan untuk mengatasi isu-isu yang mempengaruhi wilayah Pasifik Selatan dan mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di antara negara-negara anggota.

Pada tahun 1985, nama organisasi ini diubah menjadi Pacific Islands Forum untuk mencerminkan penambahan anggota baru ke organisasi, seperti Papua New Guinea dan Solomon Islands. Seiring berjalannya waktu, PIF terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi regional yang lebih kuat dan efektif. Pada tahun 2000, organisasi ini mencapai tonggak sejarah dengan menandatangani Deklarasi Biketawa, yang menetapkan kerangka kerja bagi upaya bersama dalam mengatasi krisis politik, keamanan, dan bencana alam di wilayah Pasifik Selatan.

PIF telah berperan aktif dalam mempromosikan kesejahteraan di wilayah Pasifik Selatan dengan memfasilitasi dialog dan kerjasama regional dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam membantu negara-negara anggota mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

South Pacific Forum (SPF) didirikan pada tahun 1971 dengan tujuan mempromosikan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. SPF awalnya hanya beranggotakan tujuh negara, yaitu Australia, Fiji, New Zealand, Tonga, Samoa, Cook Islands, dan Niue.

Sejak berdirinya PIF pada tahun 1971, organisasi ini telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2000, PIF meluncurkan Deklarasi Biketawa, yang menetapkan kerangka kerja regional untuk respons kolektif terhadap krisis keamanan dan politik di kawasan Pasifik Selatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PIF telah mengalami beberapa kegagalan dalam menjaga stabilitas dan kesatuan di kawasan.

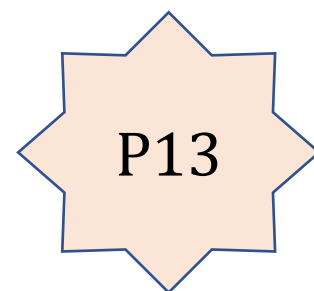
Pada tahun 2019, PIF mengalami krisis internal ketika lima anggota negara, yaitu Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, dan Palau, secara kontroversial keluar dari organisasi tersebut. Keluarnya negara-negara ini didasarkan pada ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan PIF dan perlakuan terhadap Fiji.

Selain PIF, terdapat juga *Southwest Pacific Forum (SPF)* yang didirikan pada tahun 1988 oleh Australia dan Selandia Baru. Tujuan didirikannya SPF adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan politik di antara negara-negara Pasifik Selatan. Namun, SPF hanya aktif selama beberapa tahun dan kemudian digantikan oleh PIF.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran tentang kemampuan PIF dalam mengatasi berbagai masalah di kawasan Pasifik Selatan, terutama terkait dengan konflik antara negara-negara anggotanya. Namun, dengan dukungan dan kerja sama dari negara-negara anggota, PIF masih memiliki potensi untuk menjadi organisasi regional yang kuat dan efektif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Pasifik Selatan. Selanjutnya, cermati materi bacaan berikut ini:

1. Pacific Islands Forum. (2021). About us. Diakses pada 8 Maret 2023, dari <https://www.forumsec.org/about-us/>
2. Pacific Islands Forum Secretariat. (2021). History. Diakses pada 8 Maret 2023, dari <https://www.forumsec.org/history/>
3. Ratuva, S. (2019). The crisis of regionalism in the Pacific Islands Forum. *Journal of Pacific History*, 54(2), 225-241. doi: 10.1080/00223344.2019.1602115
4. South Pacific Regional Environment Programme. (2021). Southwest Pacific Forum. Diakses pada 8 Maret 2023, dari <https://www.sprep.org/pacific-regional-environment-programme-sprep/partnerships/southwest-pacific-forum>

MASALAH DI NEGARA-NEGARA PASIFIK: PEMERINTAHAN DAN POLITIK



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa tentang sumber-sumber konflik tradisional di Pasifik, masalah otoritas dan pemerintahan sebagai sumber konflik utama di negara-negara Pasifik, dan juga kompleksitas politik serta hubungan antara sipil-militer di negara-negara Pasifik.

MASALAH POLITIK & PEMERINTAHAN DI PASIFIK SELATAN

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti sumber daya ikan, gas alam, dan mineral. Namun, kekayaan ini juga menjadi sumber konflik di antara negara-negara tersebut. Selain itu, negara-negara Pasifik Selatan juga menghadapi berbagai masalah politik dan pemerintahan yang kompleks.

Banyak negara di Pasifik Selatan mengalami masalah politik yang rumit. Salah satu masalahnya adalah ketergantungan pada bantuan asing dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Bantuan asing ini seringkali digunakan untuk membantu membiayai pembangunan dan proyek-proyek sosial. Namun, ketergantungan ini juga bisa mengakibatkan negara-negara di kawasan tersebut kehilangan kemandirian dan kontrol atas kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri.

Selain itu, kebijakan luar negeri negara-negara Pasifik Selatan juga seringkali dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara asing. Contohnya, Australia seringkali memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri di kawasan ini. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan Australia yang memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan seperti memberikan bantuan keuangan, pelatihan militer, dan program pengembangan infrastruktur.

Masalah pemerintahan juga menjadi tantangan bagi negara-negara Pasifik Selatan. Salah satu masalahnya adalah korupsi. Banyak negara di kawasan ini mengalami tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut.

Selain itu, ada juga masalah dengan sistem pemerintahan di negara-negara Pasifik Selatan. Beberapa negara di kawasan ini menghadapi tantangan dalam menerapkan demokrasi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur, dan masalah sosial yang kompleks seperti perbedaan suku dan agama.

Sumber daya alam yang melimpah di Pasifik Selatan seringkali menjadi sumber konflik di antara negara-negara di kawasan tersebut. Salah satu sumber konflik utama adalah sumber daya ikan. Banyak negara di Pasifik Selatan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Namun, penangkapan ikan yang berlebihan oleh negara-negara asing seperti China dan Jepang telah mengurangi jumlah ikan yang tersedia dan mengancam keberlangsungan hidup ikan di kawasan tersebut.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang transparan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengalihan hak-hak atas tanah tradisional masyarakat adat juga menjadi penyebab konflik di kawasan ini. Banyak kelompok masyarakat adat yang merasa dirugikan dan

terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah, sehingga mereka berusaha memperjuangkan hak-hak mereka dengan berbagai cara termasuk aksi protes dan perlawanan.

Krisis politik di beberapa negara Pasifik Selatan juga menjadi penyebab konflik di kawasan ini. Krisis politik yang terjadi di Papua Nugini pada tahun 2019 misalnya, berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait kontrak pengelolaan sumber daya alam dan isu korupsi. Krisis politik ini berujung pada pengunduran diri dari Perdana Menteri Peter O'Neill dan pelantikan James Marape sebagai Perdana Menteri baru.

Krisis politik juga terjadi di Fiji pada tahun 2006, ketika Perdana Menteri Laisenia Qarase digulingkan oleh Jenderal Frank Bainimarama dalam sebuah kudeta. Pemerintahan Bainimarama menghadapi kecaman dari masyarakat internasional dan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara tetangga.

Selain itu, perbedaan etnis dan agama juga menjadi faktor penyebab konflik di kawasan Pasifik Selatan. Misalnya, di Kepulauan Solomon terdapat konflik antara etnis Malaita dan Guadalcanal yang bermula dari persaingan ekonomi dan politik.

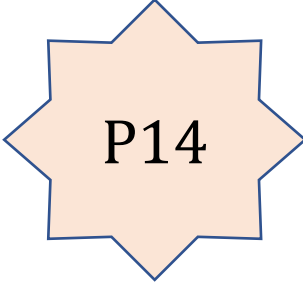
Secara keseluruhan, masalah politik, pemerintahan, dan sumber konflik di negara-negara Pasifik Selatan sangat kompleks dan beragam. Konflik yang terjadi di kawasan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti perbedaan etnis dan agama, persaingan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang kurang transparan, serta krisis politik.

Dalam menghadapi masalah tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah, baik secara nasional maupun internasional, untuk mengatasi penyebab-penyebab konflik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga

perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Selanjutnya, silakan baca materi bacaan berikut ini:

1. Albert, M., & Flanagan, R. (2019). Pacific island politics: Geopolitics and decolonisation in Oceania. Routledge.
2. Crocombe, R. (2014). Asia in the Pacific Islands: Replacing the West. editorips@usp. ac. fj.
3. International Crisis Group. (2019). Bougainville Referendum Risks Regional Instability. Crisis Group Asia Briefing N° 138.
4. International Crisis Group. (2020). Preventing Violence in Papua New Guinea's Highlands. Crisis Group Asia Briefing

KEJAHATAN TRANSNASIONAL & TRAFFICKING DI PASIFIK SELATAN



P14

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa pentingnya isu-isu non-tradisional di wilayah Pasifik, seperti *Drugs Trafficking, People smuggling, Weapons trafficking*

KEAMANAN NON-TRADISIONAL DI PASIFIK SELATAN

Wilayah Pasifik Selatan, yang terdiri dari negara-negara kepulauan seperti Australia, Selandia Baru, Fiji, Papua Nugini, Tonga, Samoa, dan Vanuatu, merupakan kawasan strategis dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geostrategis yang penting. Namun, wilayah ini juga dihadapkan dengan berbagai tantangan keamanan non-tradisional yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Tantangan-tantangan ini termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan perdagangan senjata yang semakin berkembang pesat.

Perdagangan narkoba adalah salah satu masalah keamanan non-tradisional yang paling merusak di wilayah Pasifik Selatan. Wilayah ini menjadi target pasar bagi sindikat-sindiket perdagangan narkoba global karena letaknya yang strategis dan jaringan transportasi yang luas. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan narkoba semakin berkembang pesat di wilayah ini, terutama di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

Menurut laporan Pusat Penelitian Narkoba dan Ketergantungan di Universitas New South Wales, Australia, jumlah pengguna narkoba di

wilayah Pasifik Selatan meningkat sekitar 10 persen setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke wilayah ini, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, dan kurangnya tindakan penegakan hukum yang efektif.

Penyelundupan manusia adalah masalah keamanan non-tradisional lain yang semakin berkembang di wilayah Pasifik Selatan. Wilayah ini menjadi sasaran bagi para penyelundup manusia karena letaknya yang strategis dan populasi yang terdiri dari orang-orang yang sangat rentan. Banyak orang yang berusaha melarikan diri dari kondisi yang tidak stabil dan kekerasan di negara asalnya menuju wilayah ini.

Penyelundupan manusia biasanya dilakukan melalui kapal-kapal yang tidak berlisensi, yang sering kali sangat tidak aman. Selain itu, para penyelundup juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada para korban dan mengambil uang mereka sebagai upah untuk perjalanan tersebut.

Perdagangan senjata juga merupakan masalah keamanan non-tradisional yang semakin meningkat di wilayah Pasifik Selatan. Wilayah ini menjadi sasaran bagi perdagangan senjata ilegal karena letaknya yang strategis dan lemahnya sistem penegakan hukum. Senjata-senjata ini digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk melancarkan kejahatan dan mempengaruhi keamanan dan stabilitas di wilayah ini.

Selain itu, penyelundupan senjata juga menjadi masalah keamanan non-tradisional yang cukup meresahkan di wilayah Pasifik Selatan. Senjata ilegal yang masuk ke wilayah ini dapat memicu konflik, merusak stabilitas politik, dan meningkatkan tingkat kejahatan. Misalnya, pada tahun 2000, terjadi kerusuhan di Solomon Islands yang berawal dari sengketa politik antara kelompok etnis. Kerusuhan ini semakin meruncing karena adanya penyelundupan senjata dari luar negara yang memperburuk situasi. Oleh

karena itu, pengendalian penyelundupan senjata menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas wilayah Pasifik Selatan.

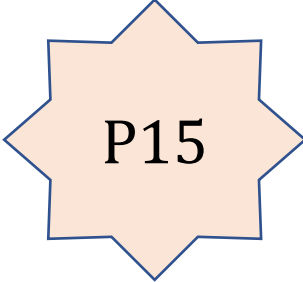
Selain tiga masalah keamanan non-tradisional di atas, masih banyak tantangan lainnya yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah Pasifik Selatan seperti cybercrime, perdagangan manusia, dan terorisme. Namun, kesadaran akan pentingnya menghadapi tantangan keamanan non-tradisional semakin meningkat di kalangan pemerintah dan masyarakat di wilayah ini. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh negara-negara di wilayah Pasifik Selatan untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional seperti kerja sama dengan negara-negara lain, peningkatan pengawasan dan pengendalian, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut.

Wilayah Pasifik Selatan memiliki kompleksitas yang berbeda dengan wilayah lainnya di dunia. Tantangan keamanan non-tradisional seperti narkoba, penyelundupan manusia, dan senjata menjadi masalah yang cukup meresahkan di wilayah ini. Selain itu, faktor geografis, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi dinamika keamanan di wilayah ini. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat di wilayah Pasifik Selatan harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghadapi tantangan keamanan non-tradisional dan melakukan tindakan konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara lain dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Pasifik Selatan. Selanjutnya, bisa dibaca sejumlah referensi berikut ini:

1. "Pacific Transnational Crime Assessment 2017." Pacific Transnational Crime Coordination Centre. 2017.
2. "Pacific Islands Forum Secretariat." Pacific Islands Forum Secretariat, 2018.

3. "2017 Drug Use in the Pacific Islands: Regional Situation Analysis of Drug Use and Responses to Drug Use." Pacific Community. 2017.
4. "Transnational Crime in the Pacific: A Threat Assessment." United Nations Office on Drugs and Crime. 2013.
5. "The Pacific Plan." Pacific Islands Forum Secretariat. 2005.

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA & INDONESIA



P15

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa hubungan diplomatik Indonesia-Australia, juga untuk memahami derajat kepentingan dan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Australia dan Pasifik.

RELASI AUSTRALIA-INDONESIA

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia telah terjalin sejak berabad-abad yang lalu. Kedua negara ini memiliki sejarah dan budaya yang berbeda namun memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang panjang dan kompleks. Kedua negara ini memiliki sejarah yang berbeda, namun mereka telah berhubungan sejak abad ke-17. Pada masa itu, Belanda menjadi penguasa Hindia Belanda dan menjadikan Indonesia sebagai koloninya. Sejak saat itu, Australia mulai mengembangkan hubungan dagang dengan Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Australia mengakui kemerdekaan Indonesia dan mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangganya itu pada tahun 1949. Pada saat itu, Australia masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadikan hubungan bilateral antara keduanya sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Australia.

Namun, hubungan bilateral antara kedua negara tersebut tidak selalu mulus. Beberapa peristiwa penting terjadi dalam sejarah hubungan bilateral Australia-Indonesia yang menjadi tantangan bagi hubungan kedua negara, seperti konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963 dan perang Timor Timur pada tahun 1975. Tindakan Australia yang dianggap tidak mendukung kemerdekaan Timor Timur oleh Indonesia, membuat hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk.

Tahun 1975, Indonesia melalui TNI melakukan intervensi militer di Timor Timur yang secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976. Hal ini membuat hubungan Indonesia-Australia menjadi semakin tegang, dan pada tahun 1999 terjadi referendum di Timor Timur yang menghasilkan pemisahan wilayah tersebut dari Indonesia. Pada masa transisi menuju referendum tersebut, Australia memainkan peran yang cukup aktif sebagai mediator dan penjaga perdamaian.

Setelah Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, hubungan bilateral kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada tahun 2006, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Keamanan (*Security Cooperation Treaty*), yang menjadi tonggak awal dalam memperkuat hubungan kedua negara dalam hal keamanan.

Kerjasama dalam berbagai bidang juga terus dilakukan, seperti kerjasama ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan. Pada tahun 2010, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Meskipun hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia telah mengalami banyak perbaikan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral mereka.

Tantangan utama yang dihadapi kedua negara adalah terkait isu keamanan dan politik.

Pada tahun 2013, terjadi insiden yang cukup kontroversial antara Indonesia dan Australia ketika terungkap bahwa Australia melakukan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Indonesia dan keluarganya. Insiden ini membuat hubungan bilateral kembali tegang, namun akhirnya berhasil diselesaikan melalui pertemuan antara kedua negara dan penegakan etika dalam hubungan internasional.

Tahun 2015, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, di mana dia memperkuat kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik. Pada kunjungan tersebut, kedua negara menandatangani kesepakatan dagang yang dikenal sebagai *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.

Kedua negara juga terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan, seperti terorisme, narkoba, dan perompakan di perairan di wilayah Indonesia dan Australia. Di bidang pendidikan, banyak pelajar Indonesia yang memilih untuk melanjutkan studi di Australia, sementara Australia juga memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia untuk belajar di negara tersebut.

Meskipun terdapat beberapa insiden yang menegangkan hubungan bilateral Australia dengan Indonesia, namun keduanya telah berhasil menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral kedua negara semakin baik, dan diharapkan akan terus membaik di masa depan.

KONTROVERSI PENGARUH AUSTRALIA TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA TERKAIT STATUS PAPUA

Papua, wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan terkait isu kedaulatan. Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu pengaruh kontroversial Australia dalam wilayah ini. Sebagai negara tetangga dan mitra regional, Australia memiliki peran penting dalam hubungan dengan Indonesia, termasuk isu kedaulatan Papua.

Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang panjang dan kompleks. Kedua negara memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa isu, salah satunya adalah isu Papua. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Australia telah menjadi salah satu negara yang mendukung klaim Indonesia atas Papua. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa Australia berada di belakang gerakan separatis di Papua dan memiliki pengaruh kontroversial dalam isu kedaulatan Papua.

Pada tahun 2018, terjadi ketegangan antara Indonesia dan Australia terkait pernyataan Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull, yang menyebut bahwa Australia “akan selalu mendukung kebebasan di Papua Barat”. Pernyataan ini dianggap sebagai dukungan Australia terhadap gerakan separatisme Papua dan menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara.

Selain itu, ada laporan yang menunjukkan adanya keterlibatan Australia dalam gerakan separatis di Papua. Laporan ini menyatakan bahwa Australia memberikan dukungan keuangan dan logistik kepada gerakan separatis Papua, serta menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi anggota gerakan. Meskipun laporan ini tidak bisa dipastikan kebenarannya,

tetapi isu ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral dengan Australia.

Isu kedaulatan Papua menjadi isu sensitif bagi Indonesia, dan Australia sebagai negara tetangga dan mitra regional harus berhati-hati dalam mengambil sikap terkait isu ini. Sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional, Australia harus berusaha untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dan menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan.

Di sisi lain, Indonesia juga harus berusaha untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Australia dan membangun kerja sama yang lebih erat dalam berbagai bidang. Dalam memecahkan isu Papua, Indonesia harus membuka ruang dialog dan konsultasi dengan masyarakat Papua, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pengaruh kontroversial Australia terhadap isu kedaulatan Papua di wilayah teritorial Indonesia harus dilihat dalam konteks hubungan bilateral kedua negara dan dinamika politik regional. Sebagai negara tetangga dan mitra regional, Australia dan Indonesia harus bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional, serta memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia di dunia, tuntutan untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan Papua semakin terdengar di tingkat internasional. Australia, sebagai negara tetangga Indonesia, dipandang memiliki peran penting dalam isu Papua. Meskipun Australia secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, namun dalam beberapa kesempatan Australia terlihat merangkul gerakan separatisme Papua dan mengkritik tindakan Indonesia dalam menangani konflik di wilayah tersebut.

Kontroversi terkait isu Papua semakin memanas ketika Australia menetapkan kebijakan pengungsian bagi para aktivis Papua yang melarikan diri dari Indonesia. Pada tahun 2006, sekitar 42 aktivis Papua masuk ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk meminta suaka politik. Australia awalnya menolak permintaan tersebut, namun setelah tekanan internasional dan aksi protes di dalam negeri, akhirnya Australia mengeluarkan visa khusus bagi para aktivis tersebut.

Tindakan Australia ini dikecam oleh pihak Indonesia dan dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Namun di sisi lain, tindakan Australia ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan separatis Papua.

Selain itu, ada juga kontroversi terkait dengan kebijakan Australia dalam menjalin hubungan militer dengan Indonesia. Sejak tahun 1999, Australia membatasi kerja sama militer dengan Indonesia sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Indonesia di Timor Timur. Namun pada tahun 2005, Australia kembali menjalin kerja sama militer dengan Indonesia dan memberikan bantuan untuk memperkuat militer Indonesia.

Hal ini menuai kritik dari sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi separatis Papua yang menyebutkan bahwa bantuan tersebut dapat digunakan oleh Indonesia untuk menekan gerakan separatis Papua. Di sisi lain, pihak Indonesia menganggap bahwa kerja sama militer dengan Australia dapat membantu meningkatkan kemampuan militer Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan.

Namun, meskipun kontroversial, hubungan antara Australia dan Indonesia tetap terus berlanjut. Kedua negara memiliki kepentingan yang saling terkait dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keamanan di kawasan. Australia menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan

kedua negara juga menjalin kerja sama dalam bidang keamanan dan anti-terorisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Australia dan Indonesia semakin membaik. Pada tahun 2018, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Selain itu, Australia juga memberikan bantuan dalam bidang infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Kesimpulannya, kontroversi terkait dengan isu Papua memang telah menjadi salah satu isu yang meruncing dalam hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa Australia memiliki pengaruh besar terhadap isu kedaulatan Papua di wilayah teritorial Indonesia. Keterlibatan Australia dalam isu Papua tidak bisa dipisahkan dari hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Australia. Terlebih lagi, kepentingan strategis Australia di kawasan Pasifik Selatan memperkuat pengaruhnya terhadap isu Papua.

Namun, peran Australia dalam isu Papua tidak selalu positif. Dalam beberapa kesempatan, Australia dianggap memihak pada gerakan separatisme Papua, seperti yang terjadi pada insiden penyelundupan senjata pada tahun 2006 dan penolakan visa terhadap para pejabat Indonesia pada tahun 2013. Hal ini memperburuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Sebagai rekomendasi, Indonesia harus terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia dan menjaga agar isu Papua tidak mengganggu hubungan tersebut. Indonesia juga harus meningkatkan diplomasi publik dan memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk mengimbangi pengaruh Australia. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah Papua untuk

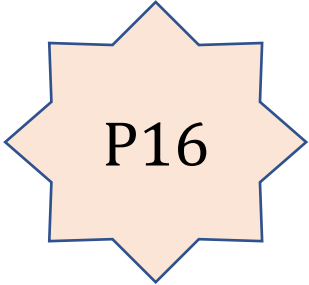
mengurangi isu-isu keamanan dan hak asasi manusia yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperburuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Secara keseluruhan, isu kedaulatan Papua menjadi sebuah isu sensitif dan kompleks yang memerlukan kerja sama dan diplomasi yang baik dari kedua negara. Indonesia dan Australia harus terus berusaha untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperkuat kerja sama di kawasan Pasifik Selatan. Untuk lebih lanjut, silakan baca daftar referensi berikut ini:

1. "Australia accused of paying Indonesian officials \$4.7m in cash for people-smuggling intelligence," ABC News, accessed March 12, 2023, <https://www.abc.net.au/news/2020-09-11/australia-accused-of-paying-indonesian-officials-for-intelligence/12653444>
2. "Australia accused of 'selling out' West Papua," RNZ News, accessed March 12, 2023, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/386219/australia-accused-of-selling-out-west-papua>
3. "Australia-Indonesia Relations: Security Cooperation," Australian Institute of International Affairs, accessed March 12, 2023, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-indonesia-relations-security-cooperation/>
4. "Australia: Human Rights Watch World Report 2022," Human Rights Watch, accessed March 12, 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/australia>
5. "Indonesia Country Profile," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, accessed March 12, 2023, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/indonesia-country-brief>

6. "West Papua: Australia urged to halt military cooperation with Indonesia," The Guardian, accessed March 12, 2023, <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/12/west-papua-australia-urged-to-halt-military-cooperation-with-indonesia>
7. "Indonesia: Human Rights Watch World Report 2022," Human Rights Watch, accessed March 12, 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>
8. "Joint Communiqué on the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, accessed March 12, 2023, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/official-documents/Pages/joint-communiqué-iacepa>
9. "Australia-Indonesia Relations: Trade and Investment," Australian Institute of International Affairs, accessed March 12, 2023, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-indonesia-relations-trade-investment/>
10. "Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, accessed March 12, 2023, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/iacepa>
11. Embassy of the Republic of Indonesia in Canberra. (2021). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). <https://indonesianembassy.org.au/en/ia-cepa/>

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)



P16

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga akan diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap hubungan Indonesia dan Australia, dengan mengevaluasi dan memberikan pandangan tentang penguatan relasi bilateral kedua negara ke depan.

REKOMENDASI BACAAN

- Bayliss, John and Steve Smith. 2001. *Globalization of World Politics?*
- Goldsten, Joshua 2003. *International Relations*. New York: Harper Collins Publ.
- Kegley and Wittkopf. 2002. *World Politics: Trend and Transformation?*
- Purwadi, YP. 2006 *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Roskin, Michael and Nicholas Berry. 2002. *IR: The New World of International Relations 5th ed*. New Jersey: Prentice Hall
- Rourke, John T. 2006. *International Politics at the World Stage 6th ed*. New York: Mc Graw Hill
- Sens, Allen and Peter Stoett. 2005. *Global Politics: Origins, Currents, Directions 3rd ed*. Canada: Thompson Nelson
- Sorensen, George and Robert Jackson.1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press
- Spiegel, Steven 1995. *World Politics in a New Era*. Orlando: Harcourt Brace & Co.
- Toma, Peter and Robert Gorman.1991. *International Relations: Understanding Global Issues*. California: Brooks/Cole Publ.